



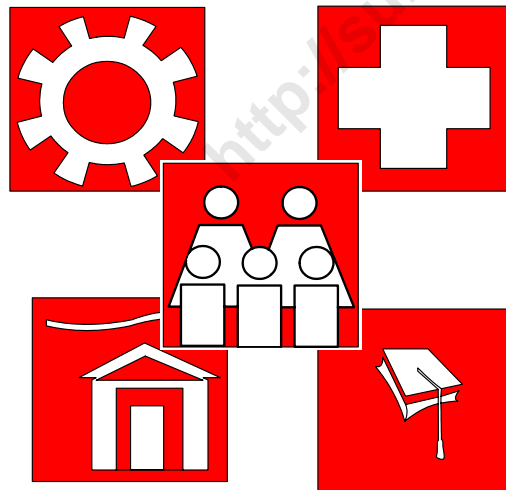
ISBN : 979 467 321.8  
Katalog BPS : 4103 12

---

---

# INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT

## SUMATERA UTARA TAHUN 2004



*BPS*

---

---

BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI SUMATERA UTARA

# INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT SUMATERA UTARA TAHUN 2004

**ISBN : 979 467 321.8**  
**KATALOG BPS : 4103 12**

**UKURAN BUKU : 27,94 CM x 21,59 CM**  
**JUMLAH HALAMAN : VII + 65**

**NASKAH :**

**BIDANG STATISTIK SOSIAL**  
**BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI SUMATERA UTARA**

**TIM PENYUSUN NASKAH :**

- **PENANGGUNGJAWAB : H.M. NASIR SYARBAINI, SE**
- **EDITOR PENANGGUNGJAWAB : IR. SUKARDI, MSI**
- **KOORDINATOR : DRA. MINDA F. GINTING**
- **ANGGOTA : SONI SAGITA PURBA, YUNUS SSI**

**GAMBAR & KULIT :**

**BIDANG STATISTIK SOSIAL**  
**BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI SUMATERA UTARA**

**SUMBER DANA :**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN) DIPA 54**  
**BPS PROVINSI SUMATERA UTARA T.A.2005**

**Diterbitkan Oleh :**

**Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara**  
**Jalan Asrama No.179 Medan Telp. (061) 8452343 (Hunting), (061) 8459966**  
**Fax. (061) 8452773**  
**Medan – 20123**

*Boleh dikutip dengan menyebut sumbernya*

# KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Badan Pusat Statistik Propinsi Sumatera Utara telah dapat menyelesaikan penyusunan publikasi Indikator Kesejahteraan Rakyat Sumatera Utara Tahun 2004.

Publikasi ini menyajikan informasi dasar tentang Indikator Kesejahteraan Rakyat, yang terdiri dari Kependudukan, Pendidikan dan Sosial Budaya, Kesehatan dan Gizi, Ketenagakerjaan, Fertilitas dan Keluarga Berencana, Konsumsi dan Pengeluaran Rumah tangga, serta Perumahan dan Lingkungan. Selain itu publikasi ini menyajikan informasi tentang status pembangunan manusia di Sumatera Utara. Diharapkan publikasi ini dapat menjadi dasar dan acuan untuk melihat kondisi kesejahteraan rakyat dan sebagai indikator keberhasilan pembangunan manusia di Sumatera Utara.

Akhirnya semua kritik dan saran, sangat kami hargai untuk perbaikan pada masa yang akan datang. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan kepada kita semua dan meridhoi usaha-usaha yang mulia ini, sehingga memberikan manfaat bagi bangsa dan negara ini.

Medan, Desember 2005

**BADAN PUSAT STATISTIK  
PROPINSI SUMATERA UTARA  
Kepala,**

**(H.M. NASIR SYARBAINI,SE)  
NIP.340003769**

---

---

# DAFTAR ISI

---

---

	<i>Halaman</i>
<b>KATA PENGANTAR</b>	i
<b>DAFTAR ISI</b>	ii
<b>DAFTAR TABEL</b>	iv
<b>DAFTAR GAMBAR</b>	vii
<b>PENJELASAN TEKNIS</b>	1
<b>1.1. KEPENDUDUKAN</b>	9
1.1.1. Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk	10
1.1.2. Struktur Umur dan Angka Beban Ketergantungan	12
1.1.3. Rasio Jenis Kelamin (Sex Ratio)	15
1.1.4. Kepadatan Penduduk	17
<b>1.2. PENDIDIKAN</b>	19
1.2.1. Partisipasi Sekolah	19
1.2.2. Tingkat Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan	20
1.2.3. Angka Buta Huruf	22
<b>1.3. KESEHATAN DAN GIZI</b>	24
1.3.1. Angka Kesakitan (Morbidity Rate)	24
1.3.2. Penolong Kelahiran	26
1.3.3. Angka Kematian Bayi dan Rata-rata Lama Balita Disusui	27
1.3.4. Angka Harapan Hidup	29
<b>1.4. KETENAGAKERJAAN</b>	31
1.4.1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	32
1.4.2. Lapangan Pekerjaan	34
1.4.3. Status Pekerjaan	38
1.4.4. Jam Kerja	41

	<i>Halaman</i>
<b>1.5. FERTILITAS DAN KELUARGA BERENCANA</b>	<b>45</b>
1.5.1. Usia Perkawinan Pertama	45
1.5.2. Angka Kelahiran Total (TFR)	48
1.5.3. Wanita Berumur 15-49 Tahun dan Berstatus Kawin Menurut Golongan Umur dan Alat/Cara KB Yang Digunakan	49
<b>1.6. KONSUMSI DAN PENGELUARAN RUMAH TANGGA</b>	<b>52</b>
1.6.1. Pengeluaran Rata-rata per Kapita	52
1.6.2. Pengeluaran Untuk Makanan	55
1.6.3. Pengeluaran Untuk Bukan Makanan	56
<b>1.7. PERUMAHAN DAN LINGKUNGAN</b>	<b>58</b>
1.7.1. Luas Lantai	59
1.7.2. Sumber Penerangan	61
1.7.3. Sumber Air Minum	61
1.7.4. Tempat Buang Air Besar	63
1.7.5. Penggunaan Jenis Dinding dan Atap Rumah	64

---

---

## DAFTAR TABEL

---

---

	<i>Halaman</i>
Tabel 1.1.1. Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk 1990-2004 .....	11
Tabel 1.1.2. Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur .....	12
Tabel 1.1.3. Rasio Beban Ketergantungan Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2000, 2002, dan 2004.....	14
Tabel 1.1.4. Rasio Jenis Kelamin Menurut Kabupaten/Kota Tahun 1999 - 2004 ....	16
Tabel 1.1.5. Kepadatan Penduduk Tahun 2004 .....	18
Tabel 1.2.1. Angka Partisipasi Sekolah Menurut Usia Sekolah Tahun 2003 dan 2004 .....	20
Table 1.2.2. Persentase Penduduk 10 Ke Atas Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2004 .....	21
Table 1.2.3. Angka Melek Huruf Penduduk 10 Tahun Ke Atas Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2004 .....	23
Tabel 1.3.1. Proporsi Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Keluhan Kesehatan dalam Sebulan Yang Lalu, Tahun 2004.....	25
Tabel 1.3.2. Rata-rata Lama (Bulan) Balita Mendapat ASI Menurut Daerah Tempat Tinggal, Tahun 2002 dan 2004.....	29
Tabel 1.4.1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Angka Pengangguran Terbuka Tahun 2004.....	32
Tabel 1.4.2. Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Kelompok Umur .....	34
Tabel 1.4.3. Komposisi Penduduk 10 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha (%)......	35
Tabel 1.4.4. Komposisi Penduduk 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha (%)......	36

Tabel 1.4.5. Komposisi Penduduk 10 Tahun Ke Atas Menurut Pekerjaan Tahun 2004 (%) .....	39
Tabel 1.4.6. Komposisi Penduduk 15 Tahun Ke Atas Menurut Pekerjaan Tahun 2004 (%) .....	40
Tabel 1.4.7. Persentase Penduduk Yang Berumur 10 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Menurut Kabupaten/Kota dan Jumlah Jam Kerja Seluruhnya .....	42
Tabel 1.4.8. Persentase Penduduk Yang Berumur 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Menurut Kabupaten/Kota dan Jumlah Jam Kerja Seluruhnya .....	43
Tabel 1.4.9. Persentase Pekerja Anak (10-14 Tahun).....	44
Tabel 1.5.1. Persentase Wanita Berusia 10 Tahun Ke Atas Yang Pernah Kawin Menurut Umur Perkawinan Pertama Tahun 2004 .....	46
Tabel 1.5.2. Proporsi Wanita Berumur 15-49 Tahun dan Berstatus Kawin Yang Pernah dan Sedang Menggunakan Alat/Cara KB Menurut Kabupaten/Kota 2004 .....	50
Tabel 1.5.3.: Proporsi Wanita Berumur 15-49 Tahun dan Berstatus Kawin Menurut Kabupaten/Kota. Dan Alat/Cara KB Yang Digunakan 2004 .....	51
Tabel 1.6.1. Rata-rata Pengeluaran Perkapita Sebulan Untuk Makanan dan Bukan Makanan Tahun 2004.....	53
Tabel 1.6.2. Distribusi Pengeluaran Makanan dan Bukan Makanan Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2004.....	54
Tabel 1.6.3. Persentase Pengeluaran Rata-rata Perkapita Sebulan Untuk Makanan Tahun 2004 .....	55
Tabel 1.6.4. Persentase Pengeluaran Rata-rata Perkapita Sebulan Untuk Bukan Makanan Tahun 2004 .....	57
Tabel 1.7.1. Persentase Rumah tangga Menurut Luas Lantai, 2004.....	59
Tabel 1.7.2. Persentase Rumah tangga Menurut Sumber Air Minum, 2004 .....	62

Tabel 1.7.3. Persentase Rumahtangga menurut Tempat Penampungan Akhir Kotoran dan Daerah Tempat Tinggal, 2004 .....	63
Tabel 1.7.4. Persentase Rumahtangga Menurut Daerah Tempat Tinggal Dan Jenis Dinding Terbanyak, 2004 .....	65
Tabel 1.7.5. Persentase Rumahtangga Menurut Daerah Tempat Tinggal Dan Jenis Atap Terluas, 2004.....	65

<http://sumut.bps.go.id>



---

---

# DAFTAR GAMBAR

---

---

*Halaman*

Gambar 1.1.1.: Laju Pertumbuhan Penduduk Provinsi Sumatera Utara, 1990-2003 .....	12
Gambar 1.2.1. : Persentase Penduduk Menurut Pendidikan dan Tipe Daerah, 2004 .....	22
Gambar 1.3.1.: Persentase Penduduk Yang Berobat Sendiri dengan Cara Pengobatannya, 2004 .....	26
Gambar 1.3.2.: Persentase Penolong Persalinan Bayi, 2004 .....	27
Gambar 1.3.3.: Kecenderungan IMR Provinsi Sumatera Utara, 1999-2004 .....	28
Gambar 1.3.4.: Kecenderungan Angka Harapan Hidup Provinsi Sumatera Utara, 1999-2004 .....	30
Gambar 1.4.1.: Persentase Penduduk 10 Tahun Ke atas Yang Bekerja Menurut Sektor A,M,S dan Tipe Daerah, 2004.....	38
Gambar 1.4.2.: Penduduk 10 Tahun Ke atas Yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan, 2004.....	41
Gambar 1.4.3.: Penduduk 10 Tahun Ke atas Yang Bekerja Menurut Jumlah Jam, 2004 .....	44
Gambar 1.5.1.: Persentase Perempuan Dengan Usia Kawin Pertama di bawah 17 Tahun Menurut Kabupaten/Kota .....	47
Gambar 1.5.2.: Perkembangan Tingkat Fertilitas (TFR) Provinsi Sumatera Utara, Tahun 1999 - 2004.....	48
Gambar 1.7.1.: Pesentase Rumahtangga Yang Mempunyai Luas Lantai Kurang dari 20 m2 Menurut Kabupaten/Kota, 2004 .....	60
Gambar 1.7.2.: Pesentase Rumahtangga Yang Mempunyai Lantai Terluas Terbuat dari Tanah, 2004.....	60

Gambar 1.7.3.: Pesentase Rumahtangga Yang Menggunakan Sumber Penerangan dari Listrik PLN, 2004 .....	61
Gambar 1.7.4.: Pesentase Rumahtangga Menurut Kepemilikan Fasilitas Tempat Buang Air Besar, 2004 .....	64

<http://sumut.bps.go.id>

# PENJELASAN

## 1. KEPENDUDUKAN

- **Tipe Daerah**

Suatu desa tertentu termasuk daerah perkotaan atau pedesaan digunakan suatu indikator komposit (indikator gabungan) yang skor atau nilainya didasarkan pada skor atau nilai-nilai tiga buah variabel : **kepadatan penduduk, persentase rumah tangga tani, dan jumlah fasilitas perkotaan.**

Variabel kepadatan penduduk mempunyai skor antara 1-10, nilai 1 adalah desa dengan kepadatan kurang dari 500 orang per Km<sup>2</sup>, nilai 2 adalah desa dengan kepadatan antara 500-999 orang per Km<sup>2</sup>, dan demikian seterusnya sampai dengan nilai 10 yaitu desa dengan kepadatan lebih besar atau sama dengan 5000 orang per Km<sup>2</sup>, dengan interval setiap kelas sebesar 500, kecuali kelas kedua dari terakhir yang intervalnya 1000.

Skor persentase rumah tangga pertanian berkisar antar 1-10. Nilai satu jika desa tersebut memiliki 95 persen atau lebih rumah tangga pertanian, dua jika 91-95 persen, dan seterusnya sampai dengan 10, jika desa mempunyai 25 persen atau kurang.

Skor untuk jenis fasilitas perkotaan berkisar antara 2-10, nilai 2 adalah desa tanpa fasilitas perkotaan sama sekali, nilai 3 jika fasilitas perkotaan ada satu buah, dan seterusnya sampai nilai 10 untuk desa yang memiliki minimal 8 jenis fasilitas perkotaan.

Jumlah nilai dari ketiga variabel tersebut kemudian digunakan untuk menentukan apakah suatu desa termasuk daerah perkotaan atau

pedesaan. Desa dengan nilai gabungan mencapai lebih dari 23 digolongkan sebagai desa perkotaan. Desa-desa dengan skor antara 17-22 akan ditentukan berdasarkan penelitian lapangan tentang perkembangan masing-masing.

- **Kepadatan penduduk** adalah banyaknya penduduk per kilometer persegi
- **Rata-rata pertumbuhan penduduk** adalah angka yang menunjukkan tingkat pertumbuhan penduduk pertahun dalam jangka waktu tertentu. Angka ini dinyatakan sebagai persentase dari penduduk pada tahun tertentu (dasar).
- **Rasio jenis kelamin** adalah perbandingan antara banyaknya penduduk laki-laki dengan penduduk perempuan pada suatu daerah dan waktu tertentu. Angka ini dinyatakan dalam banyaknya penduduk laki-laki untuk setiap 100 penduduk perempuan.

## 2. PENDIDIKAN DAN SOSIAL BUDAYA

- **Sekolah** adalah kegiatan belajar di sekolah formal mulai dari pendidikan dasar, menengah, dan tinggi, termasuk pendidikan yang disamakan.
- **Tidak/belum pernah sekolah** adalah mereka yang tidak atau belum pernah bersekolah di sekolah formal, misalnya tamat/belum tamat Taman Kanak-Kanak tetapi tidak melanjutkan ke Sekolah Dasar.
- **Masih bersekolah** adalah mereka yang sedang mengikuti pendidikan di pendidikan dasar, menengah atau tinggi.
- **Tidak sekolah lagi** adalah mereka yang pernah bersekolah tetapi pada saat pencacahan tidak bersekolah lagi.
- **Tamat sekolah** adalah menyelesaikan pendidikan pada kelas atau tingkat terakhir suatu jenjang pendidikan yang pernah diikuti (ditamatkan) oleh

seseorang yang sudah tidak sekolah lagi atau sedang diikuti oleh seseorang yang masih sekolah.

- **Jenjang pendidikan tertinggi yang pernah/sedang diduduki (ditamatkan)** adalah jenjang pendidikan yang pernah diduduki (ditamatkan) oleh seseorang yang sudah tidak sekolah lagi atau sedang diduduki oleh seseorang yang masih sekolah.

### 3. KESEHATAN DAN GIZI

- **Keluhan kesehatan** adalah keadaan seseorang yang merasa terganggu oleh kondisi kesehatan, kejiwaan, kecelakaan, atau lainnya. Seseorang yang menderita penyakit kronis dianggap mempunyai keluhan kesehatan walaupun pada waktu survei (satu bulan terakhir) yang bersangkutan tidak kambuh penyakitnya.
- **Imunisasi** adalah memasukkan kuman penyakit yang sudah dilemahkan kedalam tubuh agar tubuh mempunyai kekebalan terhadap penyakit tertentu.
- **Konsultasi** adalah datang ke tempat pelayanan kesehatan untuk membicarakan masalah kesehatan, termasuk konsultasi KB dan konsultasi ke dokter.
- **Pemeriksaan kesehatan** adalah pengamatan tingkat kesehatan seseorang baik karena mempunyai keluhan maupun untuk mengetahui ada tidaknya penyakit sedini mungkin. Pemeriksaan kesehatan dapat bersifat menyeluruh, atau sebagian dari tubuh, atau sebagian kecil saja dari tubuh.
- **Rawat jalan atau berobat jalan** adalah kegiatan atau upaya responden yang mempunyai keluhan kesehatan untuk memeriksakan atau mengatasi gangguan/keluhan kesehatannya dengan mendatangi tempat-tempat pelayanan kesehatan modern atau tradisional tanpa menginap, termasuk

mendatangkan petugas medis ke rumah pasien, membeli obat atau melakukan pengobatan sendiri.

- **Rawat inap** adalah kegiatan atau upaya responden yang mengalami keluhan kesehatan dengan mendatangi tempat pelayanan kesehatan dan harus menginap.
- **Angka Kematian Bayi** adalah angka yang menunjukkan banyaknya kematian bayi berumur dibawah 1 tahun per 1000 kelahiran dalam satu tahun.
- **Angka Harapan Hidup** adalah rata-rata lama hidup yang akan dicapai oleh bayi yang baru lahir pada suatu daerah.
- **Angka Fertilitas Total** adalah banyaknya anak yang dilahirkan oleh wanita selama masa reproduksinya dengan asumsi bahwa perilaku kelahirannya sama untuk setiap kelompok umur.

#### 4. KETENAGAKERJAAN

- **Angkatan Kerja** adalah mereka yang berumur 10 tahun keatas dan selama seminggu yang lalu mempunyai pekerjaan, baik bekerja maupun untuk sementara tidak bekerja karena suatu sebab seperti menunggu panen, sedang cuti dan sedang menunggu pekerjaan berikutnya (pekerja bebas profesional seperti dukun dan dalang). Disamping itu termasuk pula mereka yang tidak mempunyai pekerjaan tetapi sedang mencari pekerjaan atau mengharapkan mendapat pekerjaan.
- **Bukan Angkatan Kerja** adalah mereka yang berumur 10 tahun ke atas dan selama seminggu yang lalu hanya bersekolah, mengurus rumah tangga, dan tidak melakukan suatu kegiatan yang dapat dimasukkan dalam kategori bekerja dan mencari kerja.

- **Kegiatan yang terbanyak dilakukan** adalah kegiatan yang menggunakan waktu terbanyak dibanding dengan kegiatan lainnya.
- **Bekerja** adalah kegiatan melakukan pekerjaan dengan memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan selama paling sedikit satu jam secara berturut-turut dan tidak terputus dalam satu minggu, termasuk pekerja keluarga tanpa upah yang membantu dalam usaha/kegiatan ekonomi.
- **Punya pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja** adalah mempunyai pekerjaan tetapi selama seminggu yang lalu tidak bekerja karena suatu sebab seperti sakit, cuti, menunggu panen dan mogok, termasuk menunggu pekerjaan bagi yang sudah diterima bekerja tetapi selama seminggu yang lalu belum mulai bekerja.
- **Lapangan Usaha** adalah bidang kegiatan dari pekerjaan/usaha/perusahaan/instansi tempat seseorang bekerja atau pernah bekerja.
- **Status pekerjaan** adalah jenis kedudukan seseorang dalam pekerjaan, misalnya berusaha (sebagai pengusaha), buruh/karyawan, atau pekerja keluarga tidak dibayar.
- **Jam kerja** adalah jumlah waktu (dalam jam) yang digunakan untuk bekerja.
- **Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)** adalah persentase penduduk yang termasuk dalam angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja (10 tahun keatas).
- **Penduduk yang menganggur** adalah mereka yang termasuk angkatan kerja dan tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan.

## 5. FERTILITAS DAN KELUARGA BERENCANA

- **Anak lahir hidup** adalah anak yang pada waktu dilahirkan menunjukkan tanda-tanda kehidupan walaupun hanya beberapa saat saja, seperti jantung berdenyut, bernapas dan menangis.
- **Angka Pertumbuhan Alamiah** adalah selisih antara angka kelahiran dan angka kematian.
- **Peserta keluarga berencana (akseptor)** adalah orang yang mempraktekkan salah satu metode kontrasepsi.
- **Peserta keluarga berencana (akseptor) baru** adalah orang yang baru pertama kali memakai/mempergunakan metode kontrasepsi dan akseptor sesudah persalinan/keguguran.
- **Peserta keluarga berencana (akseptor) aktif** adalah orang yang pada saat ini memakai metode kontrasepsi untuk penjarangan kehamilan.
- **Pasangan Usia Subur (PUS)** adalah pasangan yang istrinya berumur 10-45 tahun.

## 6. KONSUMSI DAN PENGELUARAN RUMAH TANGGA

- **Konsumsi/pengeluaran rumah tangga** adalah pengeluaran untuk kebutuhan (konsumsi) semua anggota rumah tangga. Secara umum pengeluaran rumah tangga dibagi menjadi dua macam, yaitu pengeluaran untuk makanan (termasuk makanan, minuman, dan tembakau) dan bukan makanan (termasuk pengeluaran untuk perumahan, aneka barang dan jasa, pakaian, pajak dan pesta )
- **Konsumsi rata-rata per kapita setahun**, angka ini diperhitungkan dari konsumsi rata-rata per kapita dalam seminggu dikalikan dengan 52.



- **Pengeluaran per kapita sebulan untuk makanan**, angka ini mencakup seluruh jenis makanan termasuk makanan jadi yang dikonsumsi di luar rumah dan juga termasuk minuman tembakau dan sirih dalam jangka waktu sebulan.
- **PDRB per kapita** adalah hasil bagi PDRB Propinsi Sumatera Utara dengan jumlah penduduk pertengahan tahun.
- **Pendapatan regional per kapita** diperoleh dengan cara membagi Produk Domestik Regional Netto (PDRN) atas dasar biaya faktor dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun.
- **Pendapatan per kapita** adalah Produk Regional Netto dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun.
- **Konsumsi beras** mencakup keseluruhan beras termasuk beras ketan.
- **Konsumsi jagung** termasuk jagung pocelan, jagung basah, jagung kering dan tepung jagung yang keseluruhannya telah dikonversikan kedalam jagung pocelan.

## 7. PERUMAHAN

- **Bangunan fisik** adalah tempat perlindungan yang mempunyai dinding, lantai dan atap, baik tetap maupun sementara yang digunakan untuk tempat tinggal maupun bukan tempat tinggal.
- **Bangunan sensus** adalah sebagian atau seluruh bangunan fisik yang mempunyai pintu keluar/masuk sendiri.
- **Luas lantai** adalah luas lantai dari bangunan tempat tinggal atau jumlah dari setiap bagian tempat tinggal yang ditempati oleh anggota rumah tangga dan dipergunakan untuk keperluan hidup sehari-hari.

- **Rumah tangga** adalah sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik/sensus dan biasanya tinggal bersama serta makan dari satu dapur. Termasuk pula seseorang yang mendiami sebagian atau seluruh dan mengurus keperluan sendiri.
- **Dinding** adalah sisi luar/batas dari suatu bangunan atau penyekat dengan rumah tangga atau bangunan lain.
- **Atap** adalah penutup bagian atas bangunan yang melindungi orang yang mendiami dibawahnya dari teriknya matahari, hujan dan sebagainya. Untuk bangunan bertingkat atap yang dimaksud adalah bagian teratas dari bangunan tersebut.
- **Air ledeng** adalah sumber air yang berasal dari air yang telah diproses menjadi jernih sebelum dialirkan kepada konsumen melalui instalasi berupa saluran air. Sumber air ini diusahakan oleh PM/PDAM/BPAM (Perusahaan Air Minum/Perusahaan daerah Air Minum/Badan Pengelola Air Minum).
- **Air Sumur/perigi terlindung** adalah bila lingkaran mulut sumur/perigi tersebut dilindungi oleh tembok paling sedikit 0,8 meter di atas tanah dan sedalam 3 meter di bawah tanah dan di sekitar mulut sumur ada lantai semen sejauh 1 meter dari lingkaran mulut/perigi.
- **Kloset/dudukan leher angsa** adalah jamban/kakus yang dibawah dudukannya terdapat saluran berbentuk “U” (seperti leher angsa) dengan maksud menampung air untuk menahan agar bau tinja tidak keluar.
- **Plengsengan** adalah jamban/kakus yang dibawah dudukannya terdapat saluran rata yang dimiringkan ke pembuangan kotoran.
- **Cemplung/cubluk** adalah jamban/kakus yang dibawah dudukannya tidak ada saluran langsung ke tempat pembuangan/penampungan akhir.
- **WC lainnya** adalah yang tidak mempunyai tempat untuk duduk/jongkok termasuk yang tidak mempunyai jamban/kakus.



---

---

## 1.1 KEPENDUDUKAN

---

---

Masalah kependudukan yang antara lain meliputi jumlah, komposisi dan distribusi penduduk merupakan salah satu masalah yang perlu diperhatikan dalam proses pembangunan. Jumlah penduduk yang besar dapat menjadi potensi tetapi dapat pula menjadi beban dalam proses pembangunan jika berkualitas rendah. Oleh sebab itu untuk menunjang keberhasilan pembangunan nasional, dalam menangani permasalahan penduduk, pemerintah tidak saja mengarahkan pada upaya pengendalian jumlah penduduk tetapi juga menitik beratkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusianya. Disamping itu program perencanaan pembangunan sosial di segala bidang harus mendapat prioritas utama yang berguna untuk peningkatan kesejahteraan penduduk.

Pada pelaksanaan pembangunan perlu perhatian yang serius diantara masalah kependudukan yang mencakup antara lain mengenai jumlah, komposisi dan distribusi penduduk. Jumlah penduduk yang besar dapat menjadi modal pembangunan bila kualitasnya baik, namun sebaliknya dapat menjadi beban pembangunan bila kualitasnya rendah. Untuk itu aspek kependudukan perlu dipertimbangkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan penduduk, arus migrasi ataupun angka kelahiran dan kematian, turut serta di dalamnya menyangkut perencanaan pembangunan ekonomi, sosial budaya dan politik atau pertahanan.

Data kependudukan sangat dibutuhkan baik oleh lembaga pemerintahan ataupun swasta. Dari data kependudukan dapat dibuat perencanaan kebutuhan fasilitas penunjang kesejahteraan masyarakat, misalnya fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan masyarakat, tempat ibadah, tempat rekreasi, dan lainnya. Data kependudukan yang terkait diantaranya data tentang jumlah penduduk, kepadatan dan penyebaran penduduk dan data tentang struktur penduduk.

### 1.1.1. Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk

Pada tahun 2004 jumlah penduduk Sumatera Utara yang bertempat tinggal tetap sudah mencapai 12.123.360 jiwa. Meskipun secara absolut jumlah penduduk terus bertambah, namun secara relatif laju pertumbuhan terus mengalami penurunan diantaranya melalui program KB. Tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi secara langsung akan menambah jumlah penduduk usia muda dan dapat menimbulkan suatu permasalahan baru.

Secara absolut jumlah penduduk Sumatera Utara terus bertambah setiap tahunnya, namun secara relatif laju pertumbuhan penduduk terus menurun. Selama periode 1990-2000 rata-rata pertumbuhan penduduk setiap tahunnya sebesar 1,20 persen dengan jumlah penduduk tercatat sebanyak 10.256.027 jiwa pada tahun 1990 dan meningkat menjadi 11.513.973 jiwa pada tahun 2000. Empat tahun kemudian jumlah penduduk Sumatera Utara sudah mencapai 12.123.360 jiwa dengan rata-rata pertumbuhan penduduk pertahun 1,14 persen antara tahun 2000 sampai dengan tahun 2003. Dengan jumlah penduduk yang begitu besar maka Provinsi Sumatera Utara dihadapkan pada suatu masalah kependudukan yang sangat serius. Oleh karena itu, upaya mengendalikan pertumbuhan penduduk disertai dengan adanya upaya peningkatan kesejahteraan penduduk harus merupakan suatu upaya yang berkesinambungan dengan program pembangunan yang sedang dan akan terus dilaksanakan.

**Jumlah Penduduk Sumatera Utara Tahun 2004 sebanyak 12.123.360 jiwa**

Jika diperhatikan laju pertumbuhan penduduk periode 2000-2003 maka Kabupaten Tapanuli Tengah merupakan daerah yang tertinggi laju pertumbuhannya yakni sebesar 3,85 persen. Sebaliknya Kota Pematang Siantar mempunyai angka laju pertumbuhan penduduk paling rendah, yakni sebesar -2,63 persen yang berarti bahwa jumlah penduduk Kota P. Siantar tahun 2003 mengalami penurunan dibanding tahun 2000.

Adapun laju pertumbuhan penduduk untuk daerah-daerah lainnya terlihat pada Tabel 1.1.1. dan Gambar 1.1.1.

**Tabel 1.1.1. Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk 1990-2004**

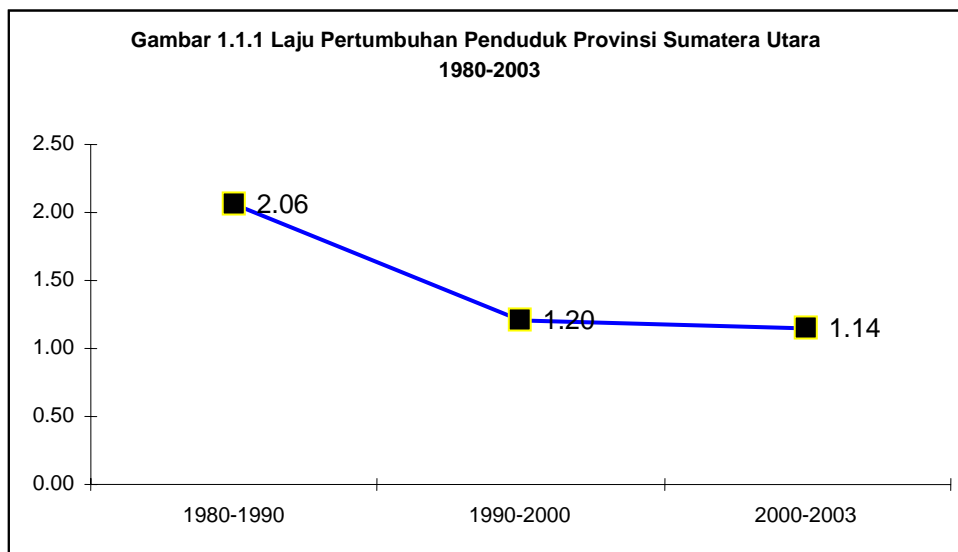
Kota/Kabupaten	Tahun				Laju Pertumbuhan	
	1990	2000	2003 <sup>2)</sup>	2004 <sup>3)</sup>	1990-2000	2000-2003
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>Kabupaten</b>						
1. Nias	589.184	683.416	422.170	433.350	1,55	0,73
2. Mandailing Natal	308.782	359.849	369.691	379.045	1,60	0,96
3. Tapanuli Selatan	645.550	734.364	596.188	609.922	1,34	1,44
4. Tapanuli Tengah	214.467	244.679	272.333	278.472	1,37	3,85
5. Tapanuli Utara	406.244	407.711	255.162	255.400	0,04	-0,01
6. Toba Samosir	289.533	304.125	285.586	167.587	0,51	-2,20
7. Labuhan Batu	733.521	844.924	910.502	933.866	1,47	2,67
8. Asahan	884.594	935.855	990.230	1.009.856	0,58	2,01
9. Simalungun	805.365	855.802	808.288	818.975	0,63	-2,00
10. Dairi	276.980	292.857	255.847	259.158	0,58	-0,39
11. Karo	257.981	283.713	306.869	312.300	0,99	2,81
12. Deli Serdang	1.602.749	1.959.488	2.054.707	1.523.881	2,10	1,69
13. Langkat	812.229	906.565	940.601	955.348	1,14	1,31
14. Nias Selatan	1)	1)	275.422	282.715	-	-
15. Humbang Hasundutan	1)	1)	152.377	152.519	-	-
16. Pakpak Bharat	1)	1)	33.822	34.260	-	-
17. Samosir	1)	1)	1)	119.873	-	-
18. Serdang Bedagai	1)	1)	1)	583.071	-	-
<b>Kota</b>						
71. Sibolga	71.895	82.310	85.505	87.260	1,41	1,35
72. Tanjung Balai	108.202	132.438	144.979	149.238	2,11	3,24
73. Pematang Siantar	219.328	241.524	223.949	227.551	1,00	-2,63
74. Tebing Tinggi	116.767	125.006	132.760	134.382	0,71	2,15
75. Medan	1.730.752	1.905.587	1.979.340	2.010.676	1,00	1,35
76. Binjai	181.904	213.760	225.535	232.236	1,68	1,91
77. P. Sidempuan	1)	1)	168.536	172.419	-	-
<b>Sumatera Utara</b>	<b>10.256.027</b>	<b>11.513.973</b>	<b>11.890.399</b>	<b>12.123.360</b>	<b>1,20</b>	<b>1,14</b>

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara

Keterangan : 1) Masih bergabung dengan Kabupaten induk (Nias, Taput, Dairi, Tobasa, Deli Serdang dan Tapsel)

2) Angka Sementara Hasil P4B, Keadaan April 2003

3) Penduduk Akhir Tahun Hasil Proyeksi



### 1.1.2. Struktur Umur dan Angka Beban Ketergantungan

Suatu daerah atau negara dikatakan berstruktur umur muda, apabila kelompok penduduk yang berusia di bawah 15 tahun jumlahnya besar (lebih dari 35 persen), sedang besarnya kelompok penduduk usia 65 tahun ke atas lebih kurang 3 persen. Sebaliknya suatu daerah atau negara dikatakan berstruktur umur tua, apabila kelompok penduduk yang berumur 15 tahun ke bawah jumlahnya kecil (kurang dari 35 persen dari seluruh penduduk) dan persentase penduduk di atas 65 tahun sekitar 15 persen (Mantra, 1985).

**Tabel 1.1.2. Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur**

Kelompok Umur	2000	2002	2004
(1)	(2)	(2)	(3)
Anak-anak	34,40	34,16	33,72
Produktif	62,00	62,11	62,57
Lansia	3,60	3,73	3,71
Angka Beban Tanggungan (ABT)	61,29	61,00	59,72

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara

**Makin turunnya rasio beban ketergantungan merupakan cerminan makin besarnya potensi sumberdaya manusia di Provinsi Sumatera Utara untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat**

Dampak keberhasilan pembangunan kependudukan diantaranya terlihat pada perubahan komposisi penduduk menurut umur yang tercermin dengan semakin rendahnya

proporsi penduduk usia tidak produktif (kelompok umur 0-14 tahun dan kelompok umur 65 tahun atau lebih) yang berarti semakin rendahnya angka beban ketergantungan. Semakin kecil angka beban ketergantungan akan memberikan kesempatan bagi penduduk usia produktif untuk meningkatkan kualitas dirinya. Bila dilihat komposisi penduduk menurut umur pada tahun 2004, ternyata Provinsi Sumatera Utara masih tergolong struktur umur muda. Ini ditunjukkan dari persentase penduduk umur muda (di bawah 15 tahun) sebesar 33,72 persen dan penduduk umur 65 tahun ke atas sebesar 3,71 persen (**Error! Reference source not found.**) dengan umur median sebesar 22 tahun. Hal ini memberikan implikasi bahwa potensi kelompok umur muda perlu mendapatkan perhatian dan pengembangan sehingga mampu menghasilkan tenaga-tenaga terampil, mandiri untuk mengisi peluang-peluang ekonomi yang ada.

Bertambah besarnya proporsi penduduk usia produktif, secara langsung mengakibatkan rasio beban tanggungan menjadi turun. Penduduk usia produktif meningkat dari 62,11 orang per seratus penduduk pada tahun 2002 menjadi 62,57 pada tahun 2004. Pada tahun 2002 terdapat 61 orang yang berusia tidak produktif ditanggung setiap seratus penduduk berusia produktif. Tahun 2004 beban tanggungan itu turun menjadi hanya 59 orang (**Error! Reference source not found.**).

**Tabel 1.1.3. Rasio Beban Ketergantungan Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2000, 2002 dan 2004**

Kota/Kabupaten	2000	2002	2004
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>Kabupaten</b>			
1. Nias	64,99	74,19	71,50
2. Mandailing Natal	*	79,12	74,06
3. Tapanuli Selatan	80,08	71,70	78,32
4. Tapanuli Tengah	73,13	80,21	79,50
5. Tapanuli Utara	73,40	77,37	76,46
6. Toba Samosir	**	82,05	69,89
7. Labuhan Batu	67,34	69,03	67,87
8. Asahan	71,56	65,84	58,35
9. Simalungun	61,42	55,86	58,78
10. Dairi	68,86	71,82	76,09
11. Karo	59,29	55,28	58,81
12. Deli Serdang	53,63	58,45	55,64
13. Langkat	60,33	54,04	54,46
<b>Kota</b>			
14. Sibolga	61,26	60,00	59,97
15. Tanjung Balai	60,77	62,00	62,05
16. Pematang Siantar	59,06	52,74	52,09
17. Tebing Tinggi	53,56	51,79	47,23
18. Medan	48,74	47,56	48,19
19. Binjai	47,99	50,83	46,20
20. P. Sidempuan	*	*	56,62
<b>Sumatera Utara</b>	<b>61,29</b>	<b>61,00</b>	<b>59,72</b>

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara

Keterangan : \* = Masih bergabung dengan Kabupaten Tapanuli Selatan  
 \*\* = Masih bergabung dengan Kabupaten Tapanuli Utara

Selanjutnya rasio beban ketergantungan bila dirinci menurut daerah kabupaten/kota cukup bervariasi. Berdasarkan hasil Susenas 2004, rasio beban ketergantungan atau tanggungan tertinggi terdapat di Kabupaten Tapanuli Tengah sebesar 79,50 persen. Tingginya rasio beban tanggungan ini diduga karena telah terjadi perpindahan penduduk (out migrant) usia produktif dengan tujuan bekerja atau melanjutkan sekolah ke daerah yang



lebih berpotensi. Dengan rendahnya rasio ketergantungan penduduk di suatu wilayah akan memberikan peluang penduduk tersebut untuk melakukan investasi, antara lain melalui pendidikan dan kesehatan terhadap penduduk usia 0-14. Kota Binjai memiliki rasio beban tanggungan yang paling kecil, yaitu 46,20 persen. Tabel 1.1.3. secara rinci memperlihatkan rasio beban ketergantungan per daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara.

### **1.1.3. Rasio Jenis Kelamin (Sex Ratio)**

Besar kecilnya rasio jenis kelamin dipengaruhi oleh pola mortalitas dan migrasi penduduk suatu daerah. Jika rasio jenis kelamin di atas 100, artinya jumlah penduduk laki-laki lebih banyak daripada jumlah penduduk perempuan di daerah tersebut.

Jumlah penduduk Sumatera Utara pada tahun 1999 dan 2001 menunjukkan bahwa jumlah laki-laki lebih banyak dari perempuan, namun hal ini berbeda untuk tahun 2004 dimana jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibanding jumlah penduduk laki-laki. Untuk tahun 2004 setiap 100 penduduk perempuan terdapat 99,92 penduduk laki-laki.

**Tabel 1.1.4. Rasio Jenis Kelamin Menurut Kabupaten/Kota Tahun 1999 - 2004**

Kota/Kabupaten	1999	2001	2004
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>Kabupaten</b>			
1. Nias	103,49	102,74	98,89
2. Mandailing Natal	*	100,51	96,09
3. Tapanuli Selatan	99,70	95,64	97,66
4. Tapanuli Tengah	98,18	104,60	100,79
5. Tapanuli Utara	105,50	96,57	98,25
6. Toba Samosir	*	100,10	97,13
7. Labuhan Batu	100,80	107,00	101,98
8. Asahan	101,25	98,90	101,14
9. Simalungun	97,31	96,29	100,33
10. Dairi	99,42	104,04	99,27
11. Karo	96,12	101,90	99,03
12. Deli Serdang	104,29	103,46	101,14
13. Langkat	101,43	99,64	102,45
14. Nias Selatan	*	*	98,15
15. Humbang Hasundutan	*	*	98,10
16. Pakpak Bharat	*	*	99,10
17. Samosir	*	*	97,13
18. Serdang Bedagai	*	*	101,14
<b>Kota</b>			
19. Sibolga	100,55	106,73	102,27
20. Tanjung Balai	101,40	99,93	100,76
21. Pematang Siantar	101,75	91,85	98,24
22. Tebing Tinggi	97,89	97,79	98,13
23. Medan	96,22	100,94	98,69
24. Binjai	101,27	94,76	100,42
			99,10
<b>Sumatera Utara</b>	<b>100,49</b>	<b>100,60</b>	<b>99,92</b>

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara

Keterangan : \* = Masih bergabung dengan Kabupaten induk (Nias, Taput, Dairi, Tobasa, Deli Serdang dan Tapsel)

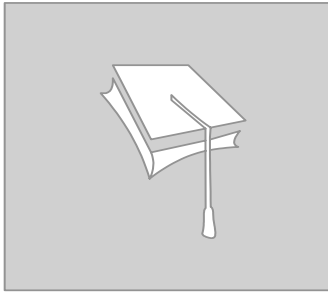
#### 1.1.4. Kepadatan Penduduk

Penyebaran penduduk antar daerah tampak masih sangat timpang, sehingga kepadatan untuk masing-masing kabupaten/kota belum merata. Kepadatan penduduk biasanya terpusat di daerah perkotaan yang umumnya memiliki segala fasilitas yang dibutuhkan oleh penduduk wilayah pedesaan untuk berusaha di daerah perkotaan. Ketidakmerataan atau timpangnya sebaran penduduk, tampak lebih jelas jika dikaitkan dengan besarnya variasi luas antar daerah. Masalah yang sering timbul yang diakibatkan oleh kepadatan penduduk terutama mengenai perumahan, kesehatan dan keamanan. Oleh karena itu, distribusi penduduk harus menjadi perhatian khusus pemerintah dalam melaksanakan pembangunan. Penyebaran penduduk dari tahun ke tahun masih terkonsentrasi di Kota Medan. Dengan luas hanya 0,37 persen dari seluruh luas wilayah daratan di Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan dihuni sekitar 16,59 persen penduduk Sumatera Utara.

**Tabel 1.1.5. Kepadatan Penduduk Tahun 2004**

Kota/Kabupaten	Luas Area (Km <sup>2</sup> )	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>Kabupaten</b>			
1. Nias	3.495,39	433.350	124
2. Mandailing Natal	6.618,79	379.045	57
3. Tapanuli Selatan	12.138,30	609.922	50
4. Tapanuli Tengah	2.188,00	278.472	127
5. Tapanuli Utara	3.726,52	255.400	69
6. Toba Samosir	2.474,40	167.587	68
7. Labuhan Batu	9.223,18	933.866	101
8. Asahan	4.580,75	1.009.856	220
9. Simalungun	4.386,60	818.975	187
10. Dairi	1.927,80	259.158	134
11. Karo	2.127,29	312.300	147
12. Deli Serdang	2.407,96	1.523.881	633
13. Langkat	6.263,30	955.348	153
14. Nias Selatan	1.825,20	282.715	155
15. Humbang Hasundutan	2.335,33	152.519	65
16. Pakpak Bharat	1.218,30	34.260	28
17. Samosir	2.069,05	119.873	58
18. Serdang Bedagai	1.989,98	583.071	293
<b>Kota</b>			
19. Sibolga	10,77	87.260	8.102
20. Tanjung Balai	60,52	149.238	2.466
21. Pematang Siantar	79,99	227.551	2.845
22. Tebing Tinggi	37,99	134.382	3.537
23. Medan	265,10	2.010.676	7.585
24. Binjai	90,33	232.236	2.571
25. P. Sidempuan	140,00	172.419	1.232
<b>Sumatera Utara</b>	<b>71.680,68</b>	<b>12.123.360</b>	<b>169</b>

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara



---

---

## 1.2 PENDIDIKAN

---

---

Pendidikan mempunyai peranan penting bagi suatu bangsa dan merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan kecerdasan dan keterampilan manusia. Kualitas sumber daya manusia antara lain sangat tergantung dari kualitas pendidikan. Pentingnya pendidikan tercermin dalam UUD'45 dan GBHN, yang mengatakan bahwa pendidikan merupakan hak setiap warga negara yang bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan demikian program pendidikan mempunyai andil besar terhadap kemajuan bangsa, ekonomi maupun sosial. Oleh karena itu, Pemerintah berupaya untuk menyediakan sarana wajib belajar 6 tahun yang dicanangkan pada tahun 1984 menjadi wajib belajar 9 tahun yang dimulai tahun 1994. Diharapkan dengan demikian tingkat pendidikan penduduknya akan lebih baik dan jumlah penduduk yang buta huruf akan berkurang terutama pada penduduk usia sekolah (7-24 tahun).

Keadaan pendidikan penduduk secara umum dapat diketahui dari beberapa indikator seperti angka partisipasi sekolah, tingkat pendidikan yang ditamatkan, dan angka melek huruf.

### 1.2.1. Angka Partisipasi Sekolah

Angka Partisipasi Sekolah merupakan indikator penting dalam pendidikan yang menunjukkan persentase penduduk usia 7-12 tahun yang masih terlibat dalam sistem persekolahan. Adakalanya penduduk usia 7-12 tahun belum sama sekali menikmati pendidikan, tetapi ada sebagian kecil dari kelompok mereka yang sudah menyelesaikan jenjang pendidikan setingkat Sekolah Dasar.

**Tabel 1.2.1. Angka Partisipasi Sekolah Menurut Usia Sekolah Tahun 2003 dan 2004**

Usia Sekolah	Laki-laki		Perempuan		Laki-laki + Perempuan	
	2003	2004	2003	2004	2003	2004
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7 – 12	97.99	97.63	98.53	97.66	98.25	97.64
13 – 15	87.43	90.33	89.67	90.24	88.51	90.28
16 – 18	61.38	65.41	65.08	67.44	63.19	66.42
19 – 24	12.69	12.10	11.70	11.41	12.20	11.75

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara

Selanjutnya perkembangan partisipasi sekolah penduduk usia 7-12 tahun di tingkat propinsi memperlihatkan penurunan dari 98,25 persen pada tahun 2003 menjadi 97,64 persen pada tahun 2004. Secara umum angka partisipasi sekolah penduduk usia 7-12 tahun menurun baik untuk laki-laki maupun perempuan.

### 1.2.2. Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan

Rendahnya tingkat pendidikan dapat dirasakan sebagai penghambat dalam pembangunan. Dengan demikian, tingkat pendidikan sangat diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk. Keadaan seperti ini sesuai dengan hakekat pendidikan itu sendiri, yakni merupakan usaha sadar untuk pengembangan kepribadian dan kemampuan di dalam dan di luar sekolah yang berlangsung seumur hidup.

Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang berhasil menamatkan pendidikan Sekolah Dasar sampai dengan Perguruan Tinggi

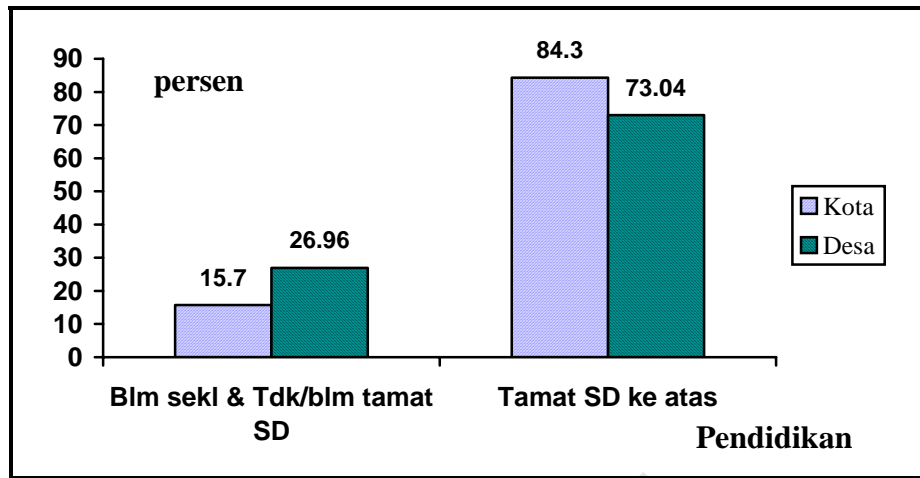
sekitar 78 persen, selebihnya sekitar 22 persen adalah mereka yang berpendidikan dibawah SD.

**Tabel 1.2.2. Persentase Penduduk 10 Ke Atas Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2004**

Kota/Kabupaten	Tidak/ Belum Pernah Sekolah	Tidak/ Belum Tamat SD	Pendidikan Yang Ditamatkan						
			SD	SLTP	SLTA	SLTA Kej	D1/ D2	D 3	D4/ S1
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
<b>Kabupaten</b>									
1. Nias	10.59	27.65	36.05	17.85	6.46	0.73	0.18	0.33	0.16
2. Mandailing Natal	1.74	24.03	41.87	20.02	8.03	2.89	0.49	0.30	0.63
3. Tapanuli Selatan	0.35	19.09	41.03	24.51	12.01	1.68	0.66	0.15	0.52
4. Tapanuli Tengah	2.39	29.03	32.78	19.72	11.61	3.03	0.59	0.32	0.53
5. Tapanuli Utara	1.71	21.91	23.23	27.92	18.28	4.78	0.59	0.77	0.81
6. Toba Samosir	2.12	14.64	20.35	26.37	29.67	4.18	0.81	1.04	0.83
7. Labuhan Batu	1.39	21.83	29.60	26.72	15.91	3.48	0.25	0.25	0.58
8. Asahan	4.32	27.82	30.96	18.83	9.46	6.68	0.52	0.26	1.15
9. Simalungun	2.82	22.88	28.40	25.34	13.96	4.52	0.31	0.91	0.87
10. Dairi	2.81	22.61	28.37	27.87	11.45	3.96	0.91	0.96	1.05
11. Karo	2.44	15.04	25.75	29.34	23.02	2.66	0.26	0.53	0.97
12. Deli Serdang	2.18	19.16	26.08	24.32	18.40	6.28	0.56	0.73	2.28
13. Langkat	2.69	19.52	31.69	27.68	14.65	2.35	0.11	0.64	0.67
<b>Kota</b>									
14. Sibolga	0.57	17.52	24.12	26.85	22.28	5.89	0.80	1.18	0.80
15. Tanjung Balai	0.96	22.89	29.26	21.16	18.18	4.07	1.02	0.55	1.91
16. Pematang Siantar	0.60	10.11	17.07	21.15	35.99	7.47	1.58	2.13	3.90
17. Tebing Tinggi	1.30	11.43	25.78	25.40	20.36	10.42	0.91	1.58	2.83
18. Medan	1.19	11.58	21.51	23.41	29.26	6.54	0.61	1.57	4.33
19. Binjai	1.79	12.54	22.84	24.43	24.41	9.24	0.48	1.78	2.48
20. P. Sidempuan	0.44	15.37	24.28	22.38	26.43	4.42	1.51	2.23	2.94
<b>Sumatera Utara</b>	<b>2.49</b>	<b>19.43</b>	<b>28.03</b>	<b>23.94</b>	<b>18.14</b>	<b>4.85</b>	<b>0.52</b>	<b>0.82</b>	<b>1.78</b>
• Perkotaan	1.43	14.27	22.22	24.36	25.50	6.77	0.75	1.47	3.24
• Pedesaan	3.34	23.62	32.74	23.60	12.17	3.29	0.34	0.30	0.60

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara

**Gambar 1.2.1. : Persentase Penduduk Menurut Pendidikan dan Tipe Daerah, 2004**



### 1.2.3. Angka Buta Huruf

Salah satu indikator yang dapat dijadikan ukuran kesejahteraan sosial yang merata adalah dengan melihat tinggi rendahnya persentase penduduk yang melek huruf. Tingkat melek huruf atau sebaliknya tingkat buta huruf dapat dijadikan ukuran kemajuan suatu bangsa. Adapun kemampuan membaca dan menulis yang dimiliki akan dapat mendorong penduduk untuk berperan lebih aktif dalam proses pembangunan.

Tabel 1.2.3. menunjukkan persentase penduduk yang buta huruf menurut kabupaten/kota terlihat bahwa Kabupaten Nias mempunyai persentase penduduk yang buta huruf mencapai angka 12.41 persen. Tingginya angka buta huruf di Kabupaten Nias antara lain disebabkan oleh sarana transportasi dan komunikasi yang terbatas, baik menuju ke daerah tersebut maupun antar daerah di Nias.



**Tabel 1.2.3. Angka Melek Huruf Penduduk 10 Tahun Ke Atas Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2004**

Kota/Kabupaten	Laki-laki		Perempuan		Laki-laki + Perempuan	
	Melek Huruf	Buta Huruf	Melek Huruf	Buta Huruf	Melek Huruf	Buta Huruf
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>Kabupaten</b>						
1. Nias	91.96	8.04	83.66	16.34	87.59	12.41
2. Mandailing Natal	98.88	1.12	97.73	2.27	98.29	1.71
3. Tapanuli Selatan	99.59	0.41	99.2	0.80	99.39	0.61
4. Tapanuli Tengah	97.43	2.57	93.91	6.09	95.65	4.35
5. Tapanuli Utara	99.12	0.88	97.68	2.32	98.42	1.58
6. Toba Samosir	98.76	1.24	95.58	4.42	97.17	2.83
7. Labuhan Batu	98.84	1.16	97.31	2.69	98.09	1.91
8. Asahan	97.49	2.51	92.17	7.83	94.83	5.17
9. Simalungun	98.38	1.62	94.32	5.68	96.33	3.67
10. Dairi	98.17	1.83	94.75	5.25	96.50	3.50
11. Karo	97.81	2.19	96.38	3.62	97.09	2.91
12. Deli Serdang	98.98	1.02	95.56	4.44	97.24	2.76
13. Langkat	98.16	1.84	95.46	4.54	96.84	3.16
<b>Kota</b>						
14. Sibolga	99.53	0.47	98.87	1.13	99.20	0.80
15. Tanjung Balai	99.65	0.35	98.15	1.85	98.92	1.08
16. Pematang Siantar	99.62	0.38	98.90	1.10	99.26	0.74
17. Tebing Tinggi	99.31	0.69	97.65	2.35	98.46	1.54
18. Medan	99.55	0.45	98.65	1.35	99.09	0.91
19. Binjai	99.47	0.53	96.77	3.23	98.11	1.89
20. P. Sidempuan	99.92	0.08	98.80	1.20	99.35	0.65
<b>Sumatera Utara</b>	<b>98.46</b>	<b>1.54</b>	<b>95.66</b>	<b>4.34</b>	<b>97.05</b>	<b>2.95</b>
• Perkotaan	99.47	0.53	97.58	2.42	98.51	1.49
• Pedesaan	97.65	2.35	94.08	5.92	95.86	4.14

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara



---

---

## 1.3 KESEHATAN

---

---

Pembangunan di bidang kesehatan bertujuan agar semua lapisan masyarakat dapat memperoleh pelayanan kesehatan secara mudah, murah dan merata. Dengan adanya upaya tersebut diharapkan akan tercapai derajat kesehatan masyarakat yang baik. Bangsa yang memiliki tingkat derajat kesehatan yang tinggi akan lebih berhasil dalam melaksanakan pembangunan. Upaya perbaikan kesehatan masyarakat dikembangkan melalui Sistem Kesehatan Nasional. Pelaksanaannya diusahakan dengan meningkatkan partisipasi aktif masyarakat yang diarahkan terutama kepada golongan masyarakat yang berpenghasilan rendah. Selain itu upaya pencegahan dan penyembuhan penyakit serta peningkatan pembangunan pusat-pusat kesehatan masyarakat serta sarana penunjangnya terus dilakukan oleh Pemerintah, seperti puskesmas, posyandu, pos obat desa, pondok bersalin desa serta penyediaan fasilitas air bersih. Oleh karena itu, pembangunan yang sedang digiatkan pemerintah diharapkan dapat berakselerasi positif.

Faktor-faktor yang mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat diantaranya adalah kurangnya sarana pelayanan kesehatan, keadaan sanitasi dan lingkungan yang tidak memadai, dan rendahnya konsumsi makanan bergizi. Tetapi faktor terpenting dalam upaya peningkatan kesehatan ada pada manusianya sebagai subyek dan sekaligus obyek dari upaya tersebut.

### 1.3.1. Angka Kesakitan (Morbidity Rate)

Salah satu indikator derajat kesehatan penduduk adalah angka kesakitan (morbidity rate). Persentase penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan dalam sebulan dan komposisi menurut umur ditunjukkan pada Tabel 1.3.1. Di sini terlihat bahwa pada usia lanjut (65 tahun ke atas) keluhan

kesehatan didominasi oleh batuk (25,10 persen). Pada usia anak-anak (0-14 tahun) didominasi oleh keluhan panas (11,76 persen), batuk (10,41 persen) dan pilek (10,82 persen). Secara umum yang menjadi keluhan kesehatan di Sumatera Utara pada tahun 2004 adalah batuk (8,66 persen), pilek (8,14 persen) dan panas (7,15 persen).

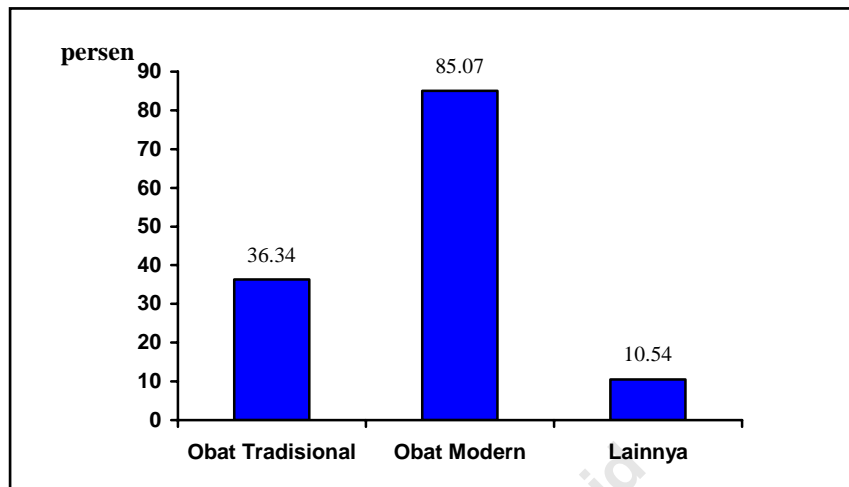
**Tabel 1.3.1. Proporsi Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Keluhan Kesehatan dalam Sebulan Yang Lalu, Tahun 2004**

Keluhan Kesehatan	Kelompok Umur			Total
	0-14	15 - 64	65 +	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Panas	11,76	4,37	12,14	7,15
Batuk	10,41	6,76	25,10	8,66
Pilek	10,82	6,42	12,83	8,14
Asma	0,31	0,79	10,50	0,98
Diare	1,63	0,74	2,55	1,11
Sakit kepala	0,79	2,76	6,73	2,24
Sakit Gigi	0,75	1,57	2,13	1,31
Lainnya	2,59	4,73	24,34	4,72

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara

Selanjutnya Gambar 1.3.1. menunjukkan persentase penduduk yang mengobati sendiri selama sebulan yang lalu. Persentase penduduk yang melakukan pengobatan sendiri dengan cara memakai obat tradisional sebesar 36,34 persen, dengan cara memakai obat modern sebesar 85,07 persen dan dengan cara lainnya 10,54 persen.

**Gambar 1.3.1.: Persentase Penduduk Yang Berobat Sendiri dengan Cara Pengobatannya, 2004**



### 1.3.2. Penolong Kelahiran

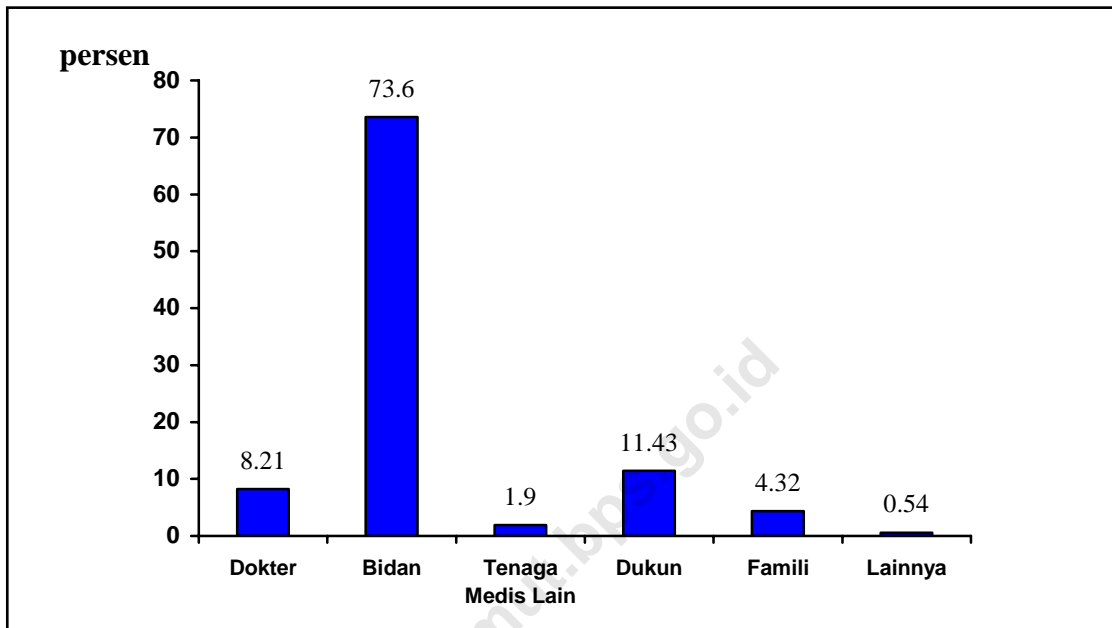
Salah satu ukuran yang digunakan untuk mengetahui keadaan kesehatan suatu daerah adalah rasio antara penduduk dengan tenaga medis. Untuk kepentingan pelayanan kesehatan, maka sarana kesehatan semakin meningkat dari tahun ke tahun, dimana peranan pihak swasta sangat membantu, disamping karena kemajuan dalam bidang pendidikan telah menambah tenaga medis dan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan.

Kesehatan balita selain dipengaruhi oleh kesehatan ibu, dapat juga dipengaruhi oleh faktor lain, diantaranya adalah penolong kelahiran. Data komposisi penolong kelahiran bayi dapat dijadikan sebagai salah satu indikator kesehatan terutama dalam hubungannya dengan tingkat kesehatan ibu dan anak serta pelayanan kesehatan secara umum. Dilihat dari kesehatan ibu dan anak, persalinan yang ditolong oleh tenaga medis seperti dokter dan bidan dapat dianggap lebih baik dibanding dengan yang ditolong oleh dukun, famili atau lainnya.

Pada Gambar 1.3.2. diketahui bahwa penolong kelahiran balita yang terbanyak adalah bidan (73,60 persen). Selanjutnya oleh dukun (11,43

persen), dokter (8.21 persen), famili (4,32 persen), tenaga medis (1,90 persen) dan lainnya (0,54 persen).

**Gambar 1.3.2.: Persentase Penolong Persalinan Bayi, 2004**

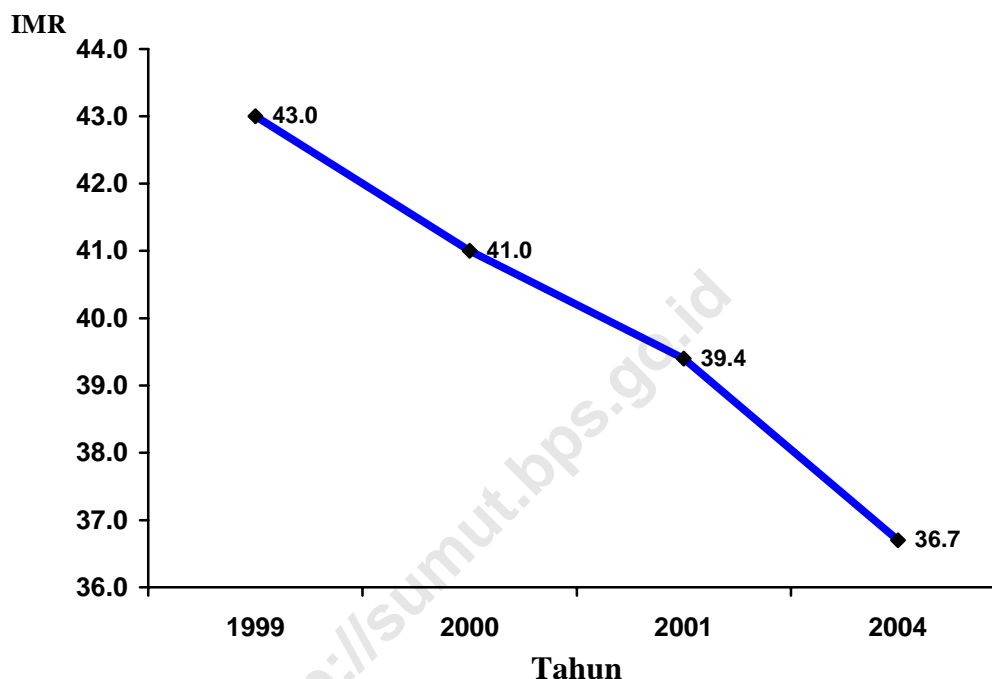


### 1.3.3. Angka Kematian Bayi (IMR) dan Rata-rata Lama (bulan) Balita Disusui

Angka Kematian Bayi (*Infant Mortality Rate / IMR*) dapat menggambarkan tingkat kesehatan penduduk secara umum. Angka ini biasanya diperkirakan melalui cara atau metode tertentu dari data hasil sensus/survei. Kematian bayi berkaitan erat dengan tingkat pendidikan keluarga, keadaan sosial ekonomi keluarga, sistem nilai adat istiadat, kebersihan dan kesehatan lingkungan serta pelayanan kesehatan yang tersedia. Sehubungan dengan itu upaya pembangunan kesehatan dimasa mendatang perlu terus ditingkatkan. Dengan pembangunan yang dilaksanakan tersebut, baik pembangunan sarana kesehatan maupun perbaikan tingkat hidup penduduk juga akan menyebabkan penurunan tingkat kematian.

IMR di Sumatera Utara selama periode 1999-2004 terus mengalami penurunan. Pada tahun 1999, IMR diperkirakan sebesar 43, dan terus menurun menjadi 41 pada tahun 2000 dan menurun lagi menjadi 36,7 pada tahun 2004.

**Gambar 1.3.3.: Kecenderungan IMR Provinsi Sumatera Utara, 1999-2004**



Air Susu Ibu (ASI) merupakan makanan yang paling penting bagi pertumbuhan dan kesehatan bayi karena selain mengandung nilai gizi yang cukup tinggi juga mengandung zat pembentuk kekebalan tubuh terhadap penyakit. Pada tahun 2002 rata-rata lamanya balita disusui 12,31 bulan. Lamanya balita disusui untuk daerah pedesaan lebih lama dibandingkan daerah perkotaan, yaitu masing-masing 12,60 persen dan 11,83 persen.

Pada tahun 2004 rata-rata lamanya balita disusui mengalami penurunan menjadi 12,18 bulan. Penurunan ini terjadi diperkotaan menjadi 11,51 bulan, tetapi di daerah pedesaan mengalami sedikit peningkatan menjadi 12,62 bulan

**Tabel 1.3.2. Rata-rata Lama (Bulan) Balita Mendapat ASI Menurut Daerah Tempat Tinggal, 2002-2004**

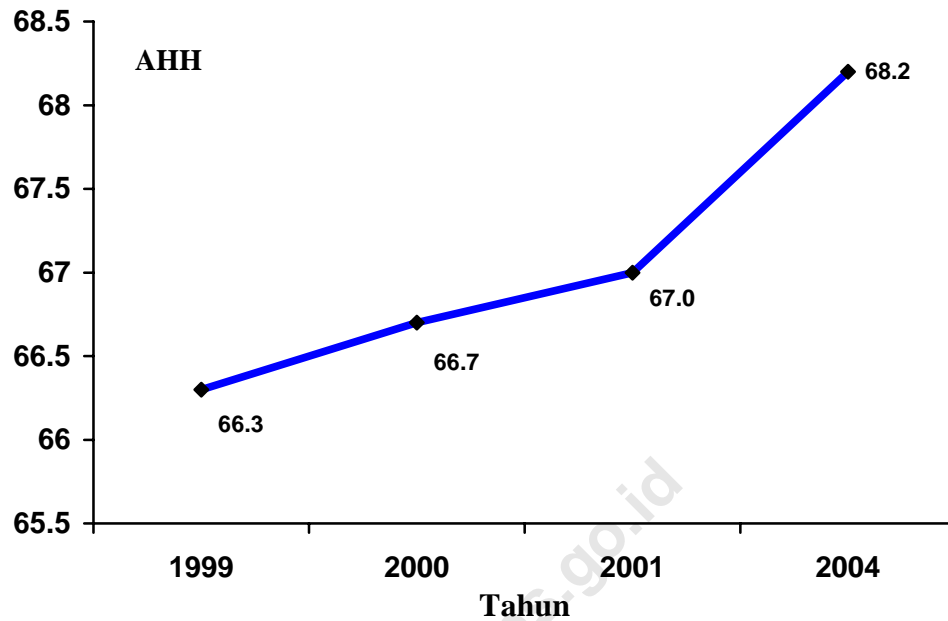
Rata-rata Lama Disusui (Bulan)	2002	2004
(1)	(2)	(3)
Kota	11,83	11,51
Desa	12,60	12,62
Kota + Desa	12,31	12,18

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara

#### 1.3.4. Angka Harapan Hidup

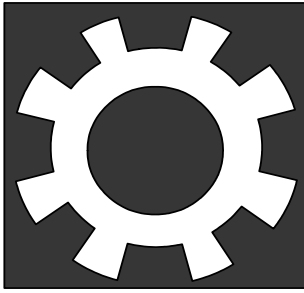
Secara umum, tingkat kesehatan penduduk suatu wilayah juga dapat dinilai dengan melihat Angka Harapan Hidup (AHH) penduduknya. Angka ini sekaligus memperlihatkan keadaan dan sistem pelayanan kesehatan yang ada dalam suatu masyarakat, karena dapat dipandang sebagai suatu bentuk akhir dari hasil upaya peningkatan taraf kesehatan secara keseluruhan. Kebijakan peningkatan kesehatan antara lain bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membiasakan diri untuk hidup sehat, diperkirakan sangat membantu memperpanjang angka harapan hidup penduduk. Di samping itu, adanya peningkatan taraf sosial ekonomi masyarakat memungkinkan penduduk untuk memperoleh perawatan kesehatan yang lebih baik sehingga dapat memperpanjang usia. Sejalan dengan penurunan IMR, maka AHH menunjukkan kenaikan (Gambar 1.3.4.).

**Gambar 1.3.4.: Kecenderungan Angka Harapan Hidup Provinsi Sumatera Utara, 1999-2004**



Kecenderungan meningkatnya angka harapan hidup ini disebabkan karena membaiknya pelayanan kesehatan dan peningkatan kondisi sosial-ekonomi yang selanjutnya memungkinkan terjadinya perbaikan gizi serta kesehatan dan lingkungan hidup sehingga angka harapan hidup naik.





---

---

## 1.4 KETENAGAKERJAAN

---

---

Angkatan kerja dalam konsep ketenagakerjaan adalah penduduk berumur 10 tahun ke atas yang bekerja atau mencari pekerjaan dalam periode seminggu yang lalu. Masalah ketenagakerjaan di Indonesia umumnya dan di Provinsi Sumatera Utara pada khususnya, dalam masa sekarang ini diperkirakan akan semakin kompleks. Indikasi ini terlihat dari penambahan penduduk usia kerja setiap tahunnya yang terus bertambah, masih banyaknya pengangguran terbuka maupun terselubung (*disguised unemployed*) atau bekerja kurang (*under employed*) sebagai akibat dari budaya bercorak agraris, lapangan pekerjaan yang sangat terbatas karena situasi perekonomian yang belum membaik serta semakin menumpuknya pengangguran terdidik sebagai konsekuensi dari peningkatan taraf pendidikan masyarakat dan pemutusan hubungan kerja sebagai akibat banyaknya perusahaan yang tutup.

Untuk memberikan gambaran mengenai ketenagakerjaan di Provinsi Sumatera Utara, maka dalam bab ini diulas secara singkat keadaan ketenagakerjaan dilihat dari penduduk usia kerja, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Selain itu, disajikan pula secara singkat indikator-indikator ketenagakerjaan yang meliputi antara lain, status pekerjaan, lapangan pekerjaan, dan jenis pekerjaan serta jam kerja. Penduduk usia kerja (*dimaksud di sini berusia 10 tahun ke atas*) digolongkan sebagai: (i) angkatan kerja, bila mereka bekerja atau mencari pekerjaan, dan (ii) bukan angkatan kerja, bila mereka bersekolah, mengurus rumahtangga, dan lainnya.

Beberapa institusi, khususnya Departemen Tenaga Kerja menggunakan batas usia minimal 15 tahun sebagai batas minimal usia tenaga kerja. Dengan demikian ada perbedaan batas minimal usia tenaga

kerja. Berdasarkan informasi ini ada kelompok usia 10 – 14 tahun sebagai yang termasuk sebagai tenaga kerja, biasanya dikenal sebagai pekerja anak.

Pada uraian tentang tenaga kerja ini akan lebih rinci melihat tenaga kerja dengan batas usia minimal 10 tahun, walaupun pada beberapa indikator tentang tenaga kerja disajikan secara berdampingan antara batas minimal 10 tahun dan 15 tahun.

#### 1.4.1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Penduduk yang termasuk kategori angkatan kerja adalah penduduk yang secara ekonomis berpotensi menghasilkan output atau pendapatan, baik yang sudah bekerja maupun yang sedang mencari pekerjaan. Semakin tinggi TPAK, berarti semakin besar pula keterlibatan penduduk usia kerja dalam pasar kerja.

**Tabel 1.4.1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Angka Pengangguran Terbuka Tahun 2004**

Wilayah/ Jenis Kelamin	Partisipasi Angkatan Kerja		Angka Pengangguran Terbuka	
	10 tahun ke atas	15 tahun ke atas	10 tahun ke atas	15 tahun ke atas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Perkotaan	54,86	62,65	19,44	18,69
Pedesaan	64,13	74,22	11,13	10,26
Perkotaan + Pedesaan	59,98	68,95	14,53	13,75
Laki-laki	73,17	84,74	11,07	10,30
Perempuan	46,99	53,59	19,83	19,05
Laki-laki + Perempuan	59,98	68,95	14,53	13,75

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara

TPAK Sumatera Utara penduduk usia minimal 10 tahun pada tahun 2004 sebesar 59,98 persen, dengan rincian 51,26 persen bekerja dan 8,72 persen mencari pekerjaan. Hal ini cukup berbeda dengan TPAK usia minimal 15 tahun yaitu sebesar 68,95 persen. Menurut daerah tempat tinggal, komposisi daerah perkotaan (54,86 persen) lebih rendah dari pedesaan (64,13 persen). Dilihat dari perbedaan jenis kelamin, maka TPAK laki-laki (73,17 persen) jauh lebih tinggi dibandingkan dengan TPAK perempuan (46,99 persen). Hal ini terutama disebabkan karena besarnya persentase penduduk perempuan yang mengurus rumahtangga, sementara penduduk laki-laki umumnya merupakan pencari nafkah utama di dalam keluarga (Tabel 1.4.1.).

TPAK perempuan yang masih rendah, diduga mempunyai potensi untuk meningkat tajam di masa depan. Kehidupan modern dengan berbagai kemudahannya dan tingkat pendidikan yang meningkat telah merubah fungsi perempuan tidak hanya terbatas di rumahtangga, tetapi juga layak bekerja dan mempunyai karir.

Jika dilihat angka pengangguran terbuka penduduk usia minimal 10 tahun ada sekitar 14,53 persen dengan rincian 19,44 persen untuk daerah perkotaan dan 11,13 persen untuk daerah pedesaan. Hal ini lebih tinggi bila dibandingkan penduduk usia minimal 15 tahun yaitu 13,75 persen dengan rincian 18,69 persen di daerah perkotaan dan 10,26 persen di daerah pedesaan. Tingkat pengangguran terbuka perempuan (19,83 persen) lebih tinggi dari pada tingkat pengangguran laki-laki (11,07 persen).

Dilihat dari kelompok umur partisipasi angkatan kerja didominasi kelompok usia produktif sebesar 70,10 persen. Dengan melihat komposisi umur dapat dianggap wajar karena pada usia produktif diharapkan mampu menanggung beban kelompok usia tidak produktif. Namun jika dilihat kelompok usia anak-anak (usia 10-14 tahun) menunjukkan masih adanya pekerja anak (9,05 persen).

**Tabel 1.4.2. Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Kelompok Umur**

Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
10 – 14	10,02	8,03	9,05
15 – 64	86,00	54,54	70,10
65 +	62,10	37,95	49,38

Sumber : BPS Sumatera Utara

#### **1.4.2. Lapangan Pekerjaan**

Untuk memudahkan analisis sektor perekonomian, maka lapangan pekerjaan utama yang terdiri dari sembilan sektor dibagi dalam tiga kelompok utama, yaitu sektor A (Pertanian), sektor M (Pertambangan/penggalian, Industri, Listrik Gas dan Air serta Bangunan), serta sektor S (Angkutan, Perdagangan, Keuangan dan Jasa) atau ketiganya biasa disebut sebagai sektor Primer, sektor Sekunder dan sektor Tertier.

**Tabel 1.4.3. Komposisi Penduduk 10 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha (%)**

Lapangan Usaha/ Sektor Perekonomian	Perkotaan			Pedesaan			Perkotaan + Pedesaan		
	L	P	L + P	L	P	L + P	L	P	L + P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
<b>1. Pertanian (A)</b>	13,73	11,93	13,16	74,51	79,31	76,44	49,14	56,91	52,02
<b>2. Industri (M)</b>									
• Pertambangan/ Penggalian	1,18	0,09	0,84	0,77	0,04	0,48	0,95	0,06	0,62
• Industri	14,35	16,45	15,02	3,89	3,11	3,58	8,26	7,55	7,99
• Listrik, Gas dan Air	0,65	0,25	0,48	0,18	0,00	0,11	0,35	0,09	0,25
• Konstruksi	10,18	0,75	7,18	3,51	0,03	2,11	6,30	0,27	4,06
<b>3. Jasa (S)</b>									
• Perdagangan	26,64	39,24	30,66	7,13	10,80	8,61	15,28	20,26	17,12
• Angkutan dan komunikasi	15,58	1,48	11,09	5,11	0,16	3,12	9,48	0,60	6,19
• Keuangan	2,23	1,76	2,08	0,42	0,09	0,29	1,18	0,65	0,98
• Jasa Kemasyarakatan	15,47	27,87	19,42	4,36	6,30	5,14	9,00	13,47	10,66
• Lainnya	0,05	0,17	0,09	0,11	0,16	0,13	0,08	0,16	0,11

Sumber : BPS Sumatera Utara

Struktur lapangan pekerjaan pada penduduk usia minimal 10 tahun di Provinsi Sumatera Utara menunjukkan bahwa sektor Pertanian merupakan lapangan pekerjaan yang paling menonjol. Ada sekitar 52,02 persen penduduk daerah ini bekerja di sektor A, dan sisanya tertampung di sektor M (12,92 persen) dan sektor S (35,06 persen). Pada penduduk usia minimal 15 tahun menunjukkan bahwa ada 51,60 persen bekerja di sektor A, di sektor M sebesar 13,05 persen dan sebesar 33,08 persen di sektor S.

**Tabel 1.4.4. Komposisi Penduduk 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha (%)**

Lapangan Usaha/ Sektor Perekonomian	Perkotaan			Pedesaan			Perkotaan + Pedesaan		
	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
<b>1. Pertanian (A)</b>	13,71	11,84	13,11	74,18	79,96	76,22	48,69	56,57	51,60
<b>2. Industri (M)</b>									
• Pertambangan/ Penggalian	1,19	0,09	0,84	0,79	0,04	0,49	0,96	0,06	0,62
• Industri	14,37	16,50	15,05	3,94	3,11	3,60	8,33	7,62	8,07
• Listrik, Gas dan Air	0,58	0,25	0,48	0,18	0,00	0,11	0,35	0,09	0,25
• Konstruksi	10,17	0,75	7,16	3,58	0,03	2,15	6,35	0,27	4,11
<b>3. Jasa (S)</b>									
• Perdagangan	26,56	39,19	30,59	7,16	10,74	8,60	15,34	20,31	17,18
• Angkutan dan komunikasi	15,63	1,49	11,12	5,21	0,17	3,18	9,60	0,61	6,28
• Keuangan	2,24	1,76	2,09	0,43	0,10	0,30	1,19	0,66	1,00
• Jasa Kemasyarakatan	15,50	27,96	19,47	4,42	6,41	5,22	9,09	13,66	10,78
• Lainnya	0,05	0,17	0,09	0,11	0,16	0,13	0,08	0,16	0,11

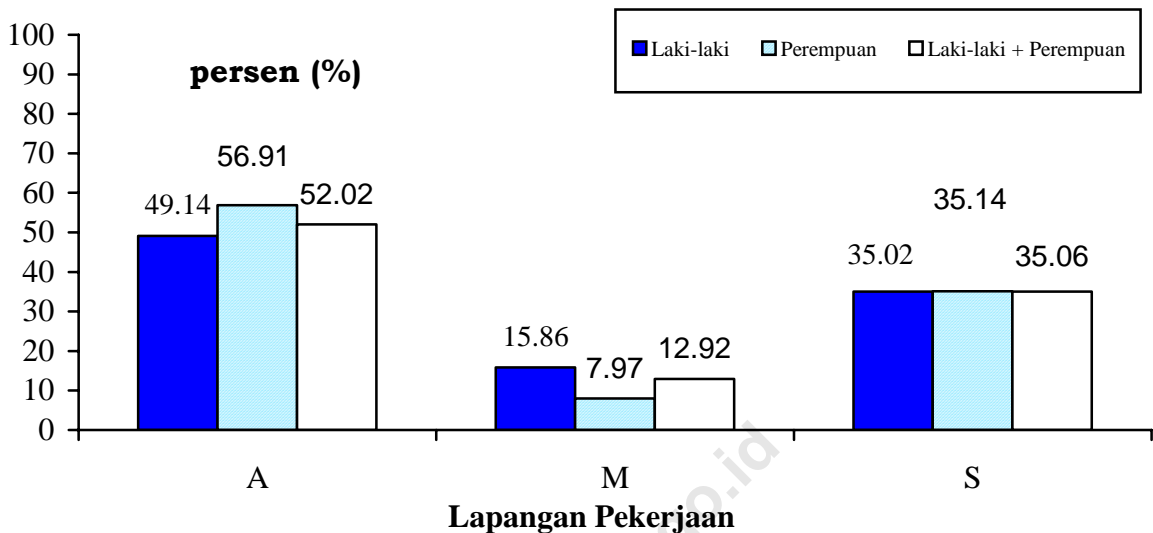
Sumber : BPS Sumatera Utara

Untuk penduduk 10 tahun keatas yang bekerja, bila diamati menurut jenis kelamin, maka sektor Pertanian (A) umumnya didominasi oleh para pekerja perempuan (56,91 persen) dibandingkan para pekerja laki-laki (49,14 persen). Sedang pada sektor Industri (M), ternyata pekerja laki-laki lebih dominan (15,86 persen) atau sekitar dua kali lipat dari pekerja perempuan (7,97 persen). Pada sektor Jasa (S), nampak bahwa persentase

pekerja laki-laki (35,02 persen) dan perempuan (35,14 persen) relatif sebanding, walaupun pekerja perempuan lebih tinggi. Namun bila diamati lebih rinci secara sektoral dalam kelompok sektor Jasa, maka pada sektor Perdagangan pekerja perempuan (20,26 persen) yang lebih dominan dibandingkan laki-laki (15,28 persen). Jika diamati menurut tipe daerah, maka pekerja di daerah perkotaan yang mengandalkan hidupnya dari sektor Pertanian (A) hanya sebesar 13,16 persen, sedangkan di daerah pedesaan mencapai 76,44 persen (Tabel 1.4.3 )

<http://sumut.bps.go.id>

**Gambar 1.4.1.: Persentase Penduduk 10 Tahun Ke atas Yang Bekerja Menurut Sektor A,M,S dan Tipe Daerah, 2004**



### 1.4.3. Status Pekerjaan

Status Pekerjaan dibedakan menjadi enam macam status pekerjaan, yaitu usaha sendiri tanpa bantuan orang lain, usaha dengan dibantu anggota rumahtangga/buruh tidak tetap, berusaha dibantu dengan buruh tetap, buruh/karyawan pemerintah dan swasta, serta pekerja keluarga. Klasifikasi status pekerjaan ini bermanfaat terutama untuk membandingkan proporsi penduduk yang bekerja sebagai buruh atau pekerja, usaha sendiri dengan yang menjadi pekerja keluarga pada sektor tertentu.

Pada umumnya pekerja keluarga, pengusaha tanpa buruh dan pengusaha dengan bantuan pekerja keluarga lebih menonjol pada sektor dan jenis pekerja yang relatif 'tradisional', sedangkan sektor dan jenis yang relatif modern terdapat lebih banyak buruh atau karyawan dan pengusaha yang dengan buruh tetap. Pekerja keluarga biasanya mengelompok pada sektor-sektor pertanian, terutama di kalangan perempuan dan penduduk laki-laki berusia muda.



Data ketenagakerjaan menurut status pekerjaannya pada tahun 2004 disajikan pada Tabel 1.4.5. Penduduk Sumatera Utara sebagian besar bekerja sebagai buruh/karyawan baik pemerintah maupun swasta sebanyak 33,23 persen, dan yang paling sedikit adalah pekerja bebas di non pertanian (2,25 persen). Yang bekerja sebagai pekerja keluarga sebesar 21,51 persen, sebagai pengusaha sendiri 20,47 persen.

**Tabel 1.4.5. Komposisi Penduduk 10 Tahun Ke Atas Menurut Pekerjaan Tahun 2004 (%)**

Status Pekerjaan Utama	Laki-laki	Perempuan	Laki Laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
Berusaha Sendiri	22,68	16,72	20,47
Berusaha Sendiri Dibantu Orang Lain	19,88	12,55	17,17
Berusaha Dengan Buruh Tetap	3,75	1,32	2,85
Buruh/Karyawan	38,11	24,93	33,23
Pekerja Bebas di Pertanian	2,85	1,97	2,53
Pekerja Bebas di Non Pertanian	2,67	1,53	2,25
Pekerjaan Keluarga	10,06	40,97	21,51

Sumber : BPS Sumatera Utara

**Tabel 1.4.6. Komposisi Penduduk 15 Tahun Ke Atas Menurut Pekerjaan Tahun 2004 (%)**

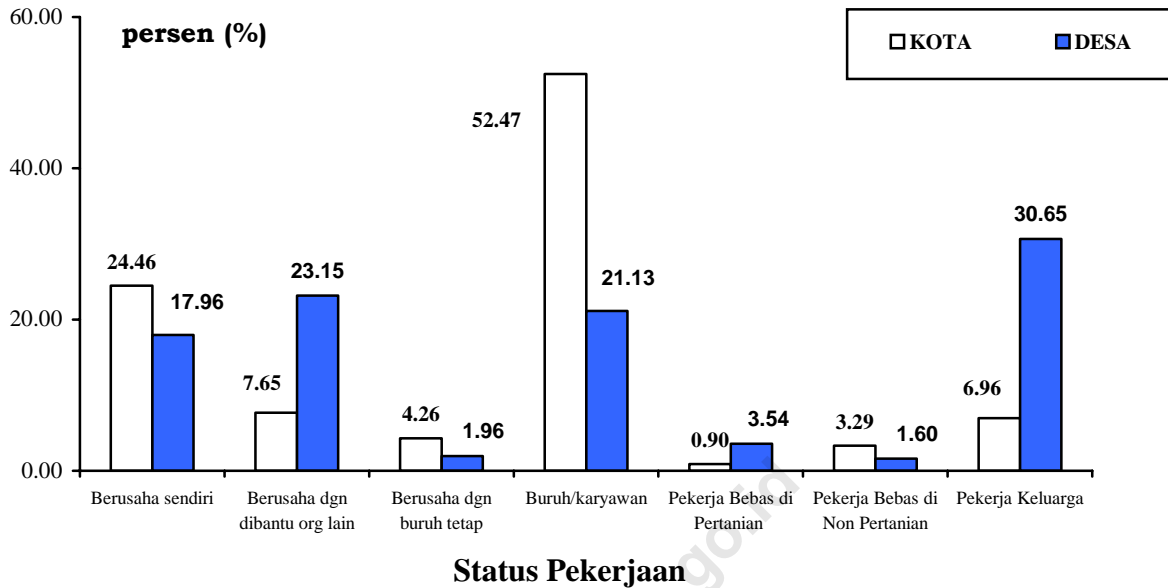
Status Pekerjaan Utama	Laki-laki	Perempuan	Laki laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
Berusaha Sendiri	22,94	16,96	20,73
Berusaha Sendiri Dibantu Orang Lain	20,10	12,70	17,36
Berusaha Dengan Buruh Tetap	3,80	1,34	2,89
Buruh/Karyawan	38,52	25,23	33,60
Pekerja Bebas di Pertanian	2,86	1,97	2,53
Pekerja Bebas di Non Pertanian	2,68	1,56	2,27
Pekerjaan Keluarga	9,10	40,25	20,62

Sumber : BPS Sumatera Utara

Pola struktur pekerja antara laki-laki dan perempuan berbeda. Sebagian besar perempuan bekerja sebagai pekerja keluarga atau pekerja tak dibayar (40,97 persen) dan buruh/karyawan (24,93 persen). Untuk penduduk laki-laki sebagian besar sebagai buruh/karyawan (38,11 persen) dan berusaha sendiri tanpa bantuan orang lain sebanyak 19,88 persen.

Selanjutnya Gambar 1.4.2.. memperlihatkan status pekerjaan utama 10 tahun ke atas menurut daerah tempat tinggal. Terlihat perbedaan komposisi antara daerah perkotaan dengan pedesaan. Di daerah perkotaan status pekerjaan utama penduduk terbesar adalah sebagai buruh/karyawan (52,47 persen), sedangkan di daerah pedesaan adalah pekerja keluarga (30,65 persen). Hal ini wajar, karena daerah kota cenderung memiliki fasilitas lebih lengkap dibanding pedesaan. Disamping itu pada daerah perkotaan penyerapan tenaga kerja relatif tinggi.

**Gambar 1.4.2.: Penduduk 10 Tahun Ke atas Yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan, 2004**



#### 1.4.4. Jam Kerja

Jam kerja normal (35 jam seminggu) sering dipakai sebagai patokan untuk mengelompokkan seorang pekerja, apakah ia termasuk pekerja penuh atau pekerja tidak penuh/sambilan. Orang dikatakan sebagai bekerja penuh (*full employed*) bila jam kerjanya mencapai 35 jam kerja atau lebih dalam seminggu (dengan mengikuti konsep bekerja minimal 1 jam berturut-turut). Sebaliknya dikatakan bekerja tidak penuh bila jam kerjanya kurang dari 35 jam dalam seminggu. Adapun penduduk dengan jam kerja 0 jam adalah penduduk yang termasuk kategori bekerja tetapi untuk sementara tidak bekerja karena sesuatu sebab, seperti sakit, cuti untuk karyawan, sedang menunggu panen untuk petani dan mogok kerja.

**Tabel 1.4.7. Persentase Penduduk Yang Berumur 10 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Menurut Kabupaten/Kota dan Jumlah Jam Kerja Seluruhnya**

Kabupaten/Kota	Jumlah Jam Kerja Seluruhnya (Jam)							Rata-rata Jam Kerja
	0	1-9	10-24	25-34	35-44	45-59	60 +	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<b>Kabupaten</b>								
1. Nias	0,05	0,64	10,36	21,22	53,22	13,40	1,11	36,56
2. Mandailing Natal	0,10	0,37	18,43	30,10	26,12	22,69	2,20	35,67
3. Tapanuli Selatan	1,92	3,13	19,34	34,35	33,64	6,33	1,29	31,74
4. Tapanuli Tengah	4,18	0,74	20,47	19,50	30,33	18,88	5,91	36,57
5. Tapanuli Utara	0,14	1,16	17,88	25,27	42,80	11,51	1,23	34,24
6. Toba Samosir	0,87	2,61	28,29	23,56	32,11	8,90	3,66	31,64
7. Labuhan Batu	0,36	1,13	21,25	24,22	30,45	16,37	6,22	35,86
8. Asahan	1,30	1,43	13,45	15,45	28,86	30,94	8,57	40,86
9. Simalungun	1,07	1,22	17,67	21,46	30,58	20,98	7,03	37,35
10. Dairi	0,90	3,03	19,68	22,02	33,93	15,40	5,04	34,56
11. Karo	0,59	0,96	8,78	25,88	35,85	24,66	3,27	38,31
12. Deli Serdang	1,19	2,06	8,74	9,12	26,98	36,54	15,36	45,03
13. Langkat	1,67	0,76	17,69	12,95	33,32	24,23	9,38	39,67
<b>Kota</b>								
14. Sibolga	2,08	0,66	8,32	11,49	21,12	34,14	22,21	47,62
15. Tanjung Balai	3,80	0,72	5,23	9,97	19,81	33,01	27,47	49,99
16. Pematang Siantar	0,68	0,23	4,32	6,02	31,36	41,93	15,45	46,80
17. Tebing Tinggi	0,99	0,77	5,48	7,13	22,59	33,33	29,71	49,50
18. Medan	0,33	0,91	4,05	5,36	23,84	46,77	18,75	48,33
19. Binjai	0,00	0,28	10,36	12,32	24,89	35,70	16,46	44,39
20. P. Sidempuan	1,47	0,44	10,24	15,68	22,93	33,58	15,66	44,85
<b>Sumatera Utara</b>	<b>0,95</b>	<b>1,35</b>	<b>13,20</b>	<b>16,85</b>	<b>31,33</b>	<b>26,67</b>	<b>9,65</b>	<b>40,33</b>

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara

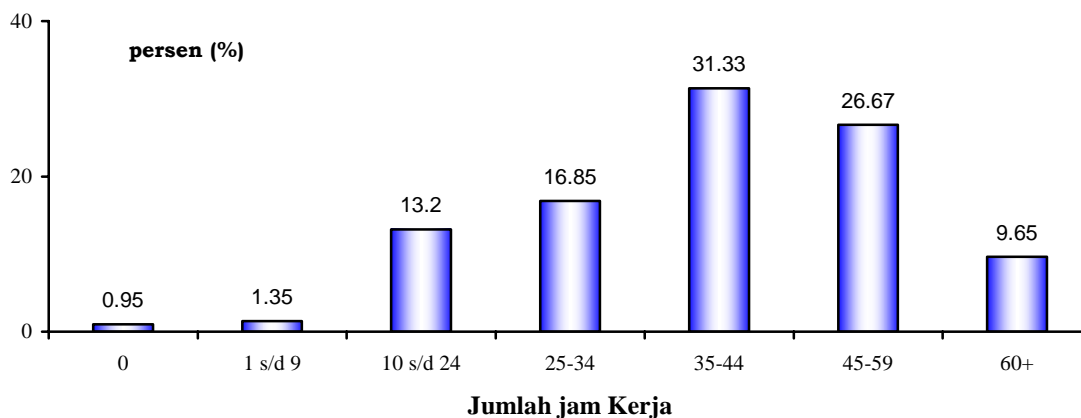
Rata-rata jam kerja yang digunakan oleh penduduk Sumatera Utara adalah 40,33 jam per minggu. Dengan melihat rata-rata jumlah jam kerja, daerah Kota relatif lebih tinggi dibandingkan daerah Kabupaten. Untuk daerah kota rata-rata jam kerja berkisar antara 44,39 sampai dengan 49,99 jam per minggu. Sedangkan daerah kabupaten rata-rata jumlah jam kerja berkisar antara 31,64 sampai dengan 45,03 jam per minggu.

**Tabel 1.4.8. Persentase Penduduk Yang Berumur 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Menurut Kabupaten/Kota dan Jumlah Jam Kerja Seluruhnya**

Kabupaten/Kota	Jumlah Jam Kerja Seluruhnya (Jam)							Rata-rata Jam Kerja
	0	1-9	10-24	25-34	35-44	45-59	60 +	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<b>Kabupaten</b>								
1. Nias	0,06	0,50	8,98	21,23	54,35	13,73	1,15	36,95
2. Mandailing Natal	0,10	0,20	18,37	30,02	26,32	22,78	2,21	35,76
3. Tapanuli Selatan	1,94	2,59	18,98	34,75	34,03	6,40	1,31	32,00
4. Tapanuli Tengah	4,27	0,47	19,80	19,47	30,82	19,12	6,05	36,87
5. Tapanuli Utara	0,14	0,92	15,62	26,01	44,17	11,88	1,26	34,87
6. Toba Samosir	0,96	1,39	23,36	25,34	35,17	9,77	4,01	33,34
7. Labuhan Batu	0,36	1,14	21,01	24,17	30,61	16,46	6,25	35,93
8. Asahan	1,32	1,45	12,84	15,55	29,04	31,14	8,66	41,05
9. Simalungun	1,08	1,14	17,31	21,61	30,80	21,05	7,01	37,46
10. Dairi	0,87	2,07	17,24	22,87	35,52	16,15	5,28	35,57
11. Karo	0,60	0,74	8,66	25,98	35,99	24,75	3,28	38,42
12. Deli Serdang	1,13	2,07	8,45	9,11	27,04	36,72	15,48	45,14
13. Langkat	1,67	0,67	17,49	13,00	33,44	24,31	9,42	39,76
<b>Kota</b>								
14. Sibolga	2,08	0,66	8,32	11,50	21,14	34,17	22,13	47,58
15. Tanjung Balai	3,84	0,73	4,79	9,87	19,71	33,28	27,78	50,26
16. Pematang Siantar	0,68	0,23	4,32	6,02	31,36	41,93	15,46	46,80
17. Tebing Tinggi	0,99	0,66	5,40	7,16	22,69	33,37	29,73	49,56
18. Medan	0,33	0,92	4,05	5,36	23,86	46,73	18,75	48,33
19. Binjai	0,00	0,28	10,39	12,36	24,89	35,65	16,43	44,35
20. P. Sidempuan	1,48	0,45	9,67	15,75	23,08	33,84	15,73	45,01
<b>Sumatera Utara</b>	<b>0,95</b>	<b>1,20</b>	<b>12,50</b>	<b>16,95</b>	<b>31,65</b>	<b>26,98</b>	<b>9,77</b>	<b>40,62</b>

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara

**Gambar 1.4.3.: Penduduk 10 Tahun Ke atas Yang Bekerja Menurut Jumlah Jam, 2004**

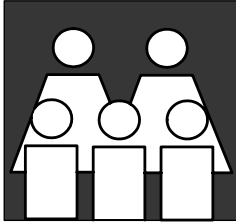


Dengan melihat beberapa indikator tenaga kerja di atas dapat dilihat bahwa walaupun menggunakan usia minimal yang berbeda yaitu usia minimal 10 tahun dan usia minimal 15 tahun menunjukkan hal-hal yang tidak berbeda. Bahkan dengan melihat kelompok usia 10 –14 tahun dapat melihat keterlibatan pekerja anak. Pekerja anak ini sebagian besar bekerja di sektor pertanian, yaitu sebagai pekerja keluarga.

**Tabel 1.4.9. Persentase Pekerja Anak (10-14 Tahun)**

Lapangan Usaha	Perkotaan			Pedesaan			Perkotaan + Pedesaan		
	L	P	L + P	L	P	L + P	L	P	L + P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Pertanian	20,43	41,82	27,32	91,24	81,62	87,18	83,86	78,83	81,78
Industri	6,98	0,00	4,73	1,69	3,34	2,39	2,24	3,10	2,60
Konstruksi	15,98	2,72	11,71	0,00	0,00	0,00	1,66	0,19	1,06
Perdagangan	51,03	52,74	51,58	5,48	13,95	9,06	10,22	16,68	12,89
Angkutan	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,03	0,04	0,00	0,02
Jasa	5,57	2,72	4,65	1,55	1,09	1,35	1,97	1,20	1,65

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara



---

---

## 1.5 FERTILITAS DAN KELUARGA BERENCANA

---

---

Salah satu komponen utama kependudukan yang menyebabkan terjadinya perubahan penduduk adalah fertilitas. Fertilitas menyangkut banyaknya bayi atau anak lahir hidup yang dilahirkan oleh wanita atau sekelompok wanita. Banyaknya anak yang dilahirkan sangat erat kaitannya terhadap kesejahteraan rumahtangga. Semakin banyak jumlah anak, berarti semakin besar tanggungan kepala rumahtangga dalam memenuhi kebutuhan material dan spiritual anggota rumahtangganya. Bagi rumah tangga dengan kondisi ekonomi yang lemah, maka pembatasan jumlah anak merupakan salah satu cara bagi tercapainya keluarga yang sejahtera.

Dalam upaya melakukan pembatasan jumlah anak yang akan dilahirkan, maka penduduk wanita pada usia tertentu menjadi sasarannya. Usia tertentu yang dimaksudkan disini adalah usia antara 15-49 tahun. Hal ini disebabkan pada usia tersebut kemungkinan wanita melahirkan anak cukup besar. Wanita yang berada pada usia tersebut ini disebut wanita usia subur (*WUS*) dan pasangan usia subur (*PUS*) bagi yang berstatus kawin.

Selanjutnya usia wanita saat perkawinan pertama selain mempengaruhi fertilitas juga mempunyai resiko dalam melahirkan. Semakin muda usia saat perkawinan pertama, semakin besar resiko yang dihadapi bagi keselamatan ibu maupun anak karena belum matangnya rahim wanita muda untuk memproduksi anak, atau karena belum siapnya mental menghadapi masa kehamilan/kelahiran. Demikian pula sebaliknya, semakin tua usia saat perkawinan pertama, semakin tinggi resiko yang dihadapi dalam masa kehamilan/melahirkan.

### 1.5.1. Usia Perkawinan Pertama

Perkawinan merupakan komponen yang mempunyai pengaruh cukup besar terhadap fertilitas yang merupakan salah satu unsur pertumbuhan

penduduk. Pada dasarnya ada dua macam bentuk perkawinan, pertama yang menunjukkan perubahan status dari belum kawin ke status kawin. Kedua, kawin kembali, yaitu perubahan dari status cerai menjadi status kawin kembali. Dalam kaitan dengan subbagian ini, definisi yang digunakan adalah yang pertama, yaitu perubahan dari status belum kawin menjadi kawin.

Wanita berumur 10 tahun ke atas yang melangsungkan perkawinan, akan melalui suatu proses biologis, yaitu melahirkan berulang kali sampai dengan masa menopause. Oleh karena itu, umur perkawinan pertama dianggap mempengaruhi panjangnya masa reproduksi. Semakin muda seorang wanita menikah, maka semakin panjang usia reproduksinya dan semakin besar pula kemungkinannya mempunyai anak.

Selanjutnya Tabel 1.5.1. menampilkan persentase wanita 10 tahun ke atas yang pernah kawin menurut umur perkawinan pertama. Secara umum, sebagian besar (modus) usia saat perkawinan pertama adalah 19-24 tahun (57,68 persen). Adapun persentase wanita pernah kawin yang usia perkawinan pertamanya kurang dari 17 tahun lebih sedikit yaitu mencapai 7,57 persen.

**Tabel 1.5.1. Persentase Wanita Berusia 10 Tahun Ke Atas Yang Pernah Kawin Menurut Umur Perkawinan Pertama Tahun 2004**

Usia Perkawinan Pertama	Perkotaan	Pedesaan	Perkotaan + Pedesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
10 – 16	6,51	8,37	7,57
17 – 18	15,38	20,82	18,49
19 – 24	56,99	58,20	57,68
25 – 34	20,34	12,19	15,68
35 +	0,79	0,42	0,58

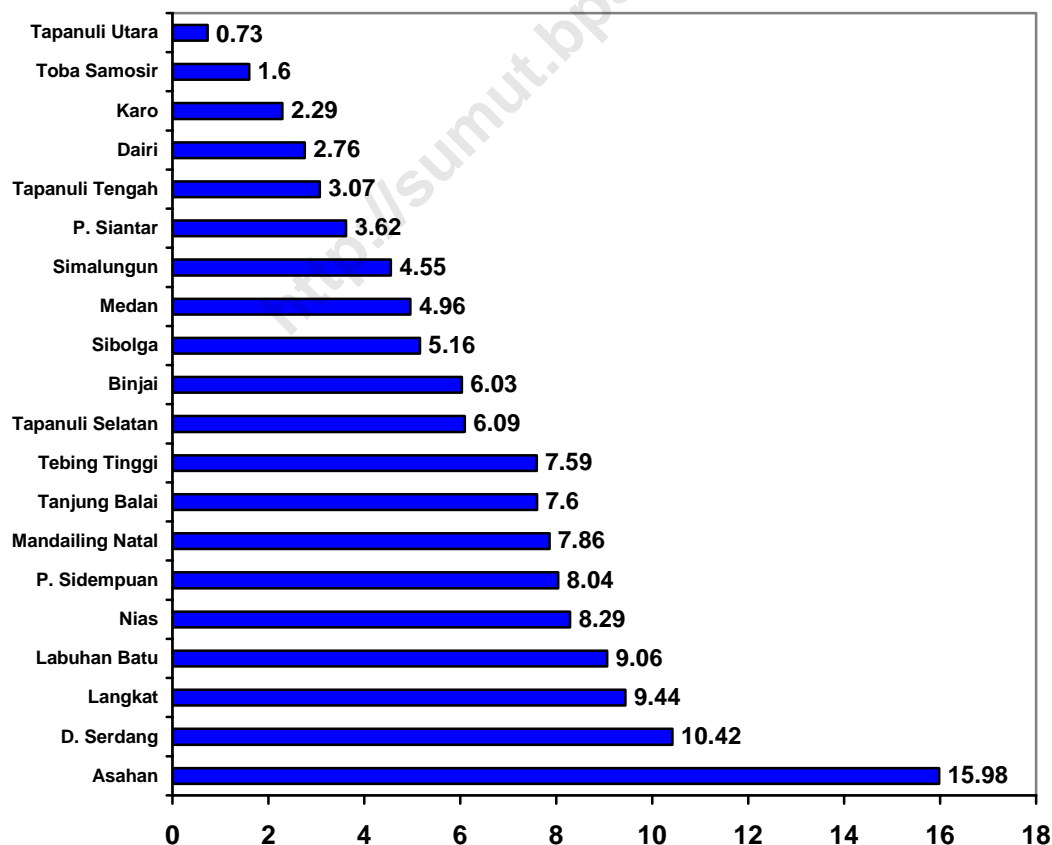
Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara



Dengan melihat daerah perkotaan dan pedesaan terlihat bahwa perkawinan dalam usia muda lebih banyak terjadi di daerah pedesaan dibandingkan di daerah perkotaan. Menurut daerah kabupaten/kota terlihat bahwa persentase wanita yang pernah kawin pada usia muda (kurang dari 17 tahun) cukup bervariasi, dengan persentase terendah di Kabupaten Tapanuli Utara (0,73 persen) dan yang tertinggi di Kabupaten Asahan (15,98 persen). Urutan perkawinan di bawah usia 17 tahun menurut daerah kabupaten/kota ditampilkan pada Gambar 1.5.1.

Untuk daerah Kota, yang mempunyai persentase perempuan dengan usia kawin pertama dibawah 17 tahun tertinggi adalah Kota Padang Sidempuan (8,04 persen) dan terendah berada di Kota Pematang Siantar (3,62 persen).

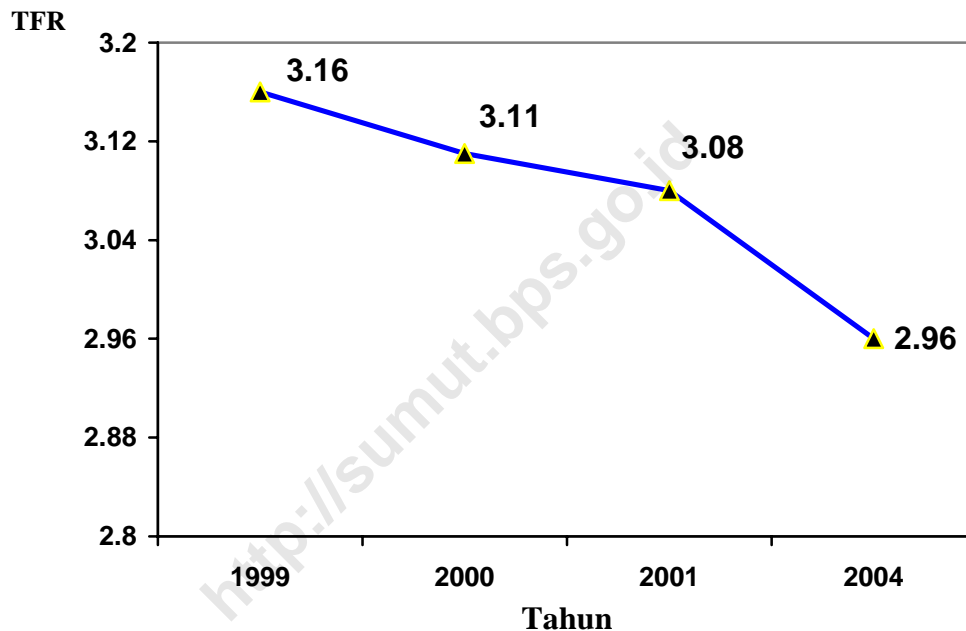
**Gambar 1.5.1.: Persentase Perempuan Dengan Usia Kawin Pertama di bawah 17 Tahun Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2004**



### 1.5.2. Angka Kelahiran Total ( *Total Fertility Rate/ TFR* )

TFR adalah angka yang menunjukkan rata-rata jumlah anak yang dilahirkan oleh sekelompok wanita sampai akhir masa reproduksinya dengan asumsi wanita-wanita tersebut mengikuti pola kelahiran pada saat perhitungan.

**Gambar 1.5.2.: Perkembangan Tingkat Fertilitas (TFR) Provinsi Sumatera Utara, Tahun 1999 - 2004**



Dilihat dari angka TFR pada tahun 2001 sebesar 3,08 dan turun menjadi 2,96 pada tahun 2004. Banyak faktor yang mempengaruhi penurunan tingkat fertilitas, baik secara langsung maupun tidak langsung. Faktor yang berpengaruh langsung antara lain adalah pemakaian kontrasepsi dan umur pada saat perkawinan pertama. Sedang faktor yang tidak langsung adalah faktor sosial ekonomi seperti pendidikan, pengalaman bekerja dan lain-lain.

### **1.5.3. Wanita Berumur 15-49 Tahun dan Berstatus Kawin Menurut Golongan Umur dan Alat/Cara KB Yang Digunakan**

Penurunan tingkat fertilitas di Provinsi Sumatra Utara telah berlangsung cukup lama, namun yang menarik untuk dibahas adalah perubahan yang terjadi setelah dimulainya program keluarga berencana nasional. Penurunan tersebut masih akan terus berlangsung tetapi dengan percepatan yang semakin lambat. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi penurunan fertilitas. Pengalaman menunjukkan bahwa penurunan tingkat fertilitas dipengaruhi oleh meningkatnya faktor sosial ekonomi masyarakat. Oleh karenanya, selain dikarenakan program KB, penurunan fertilitas juga disebabkan oleh semakin tingginya tingkat pendidikan yang dicapai yang nantinya akan mempengaruhi umur pada saat perkawinan pertama.

Pasangan suami isteri yang hidup bersama dengan usia isterinya antara 15-49 tahun merupakan sasaran dari program KB. Hal ini disebabkan karena pada usia tersebut seorang wanita sedang berada pada kemungkinan terbesar untuk melahirkan, sehingga untuk mencapai sasaran atau tujuan yang telah ditargetkan, diadakan penelitian tentang alat/cara kontrasepsi yang digunakan para akseptor.

Jika dilihat Tabel 1.5.2. persentase wanita berumur 15-49 tahun dan berstatus kawin, yang pernah menggunakan/memakai alat/cara KB adalah sebesar 57,67 persen, dengan rincian 60,70 persen di perkotaan dan 55,33 persen di pedesaan. Berarti lebih dari separuh wanita usia subur di Sumatera Utara telah membantu pemerintah dalam mensukseskan program KB. Melihat keadaan daerah kabupaten/kota, proporsi wanita yang pernah ikut KB tersebut sangat bervariasi. Di Kabupaten Langkat sudah cukup tinggi yakni 76,18 persen, sedangkan di Kabupaten Nias sangat rendah, yaitu hanya sebesar 22,56 persen.

**Tabel 1.5.2. Proporsi Wanita Berumur 15-49 Tahun dan Berstatus Kawin Yang Pernah dan Sedang Menggunakan Alat/Cara KB Menurut Kabupaten/Kota 2004**

Kota/Kabupaten	Memakai Alat KB	
	Pernah	Sedang
(1)	(2)	(3)
<b>Kabupaten</b>		
1. Nias	22,56	13,75
2. Mandailing Natal	33,43	23,91
3. Tapanuli Selatan	31,07	12,88
4. Tapanuli Tengah	33,35	23,55
5. Tapanuli Utara	42,75	29,63
6. Toba Samosir	44,28	30,81
7. Labuhan Batu	66,30	49,03
8. Asahan	69,50	53,19
9. Simalungun	69,50	58,40
10. Dairi	38,42	26,88
11. Karo	47,68	40,17
12. Deli Serdang	69,73	54,09
13. Langkat	76,18	63,22
<b>Kota</b>		
14. Sibolga	61,30	40,94
15. Tanjung Balai	55,98	37,61
16. Pematang Siantar	40,60	25,81
17. Tebing Tinggi	65,07	44,52
18. Medan	54,60	40,47
19. Binjai	68,50	49,33
20. P. Sidempuan	57,01	41,39
<b>Sumatera Utara</b>	<b>57,67</b>	<b>43,43</b>
Perkotaan	60,70	45,02
Pedesaan	55,33	42,20

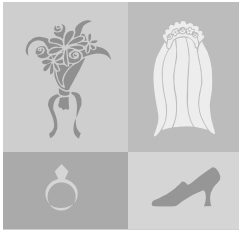
Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara

Persentase wanita usia 15-49 tahun berstatus kawin yang sedang menggunakan/memakai alat/cara KB adalah sebesar 43,43 persen. Dari proporsi wanita usia 15-49 tahun yang sedang menggunakan/memakai alat/cara KB tersebut diantaranya menggunakan alat/cara suntik (42,84 persen), pil KB (36,43 persen) dan IUD/AKDR (6,40 persen). Tingginya persentase pemakaian alat/cara suntik secara keseluruhan, disebabkan karena alat/cara tersebut sangat disukai.

**Tabel 1.5.3.: Proporsi Wanita Berumur 15-49 Tahun dan Berstatus Kawin Menurut Kabupaten/Kota dan Alat/Cara KB Yang Digunakan, 2004**

Kota/Kabupaten	MOW	MOP	IUD/ AKDR /Spiral	Suntik	Susuk KB	Pil KB	Kon- dom	Alat Tradisio nal Lainnya	Tradisio nal
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
<b>Kabupaten</b>									
1. Nias	2,62	3,93	26,18	53,18	0,00	9,01	2,47	1,31	1,31
2. Mandailing Natal	0,76	1,02	2,03	41,36	2,03	43,16	6,60	0,00	3,05
3. Tapanuli Selatan	1,20	2,30	0,69	52,92	15,47	23,87	0,00	0,00	3,57
4. Tapanuli Tengah	3,64	1,89	2,77	39,44	17,47	31,73	1,02	1,02	1,02
5. Tapanuli Utara	11,54	1,92	15,39	45,16	6,75	11,56	0,96	2,88	3,84
6. Toba Samosir	8,20	0,00	10,09	53,62	17,77	5,24	2,05	0,00	3,03
7. Labuhan Batu	2,06	0,00	0,34	67,45	2,40	25,34	1,03	0,00	1,37
8. Asahan	8,48	0,32	6,56	38,06	3,91	39,74	0,65	0,00	2,28
9. Simalungun	5,34	0,97	7,17	44,90	8,68	29,26	1,38	1,32	0,97
10. Dairi	11,60	3,88	14,67	41,61	12,71	4,86	2,90	0,00	7,76
11. Karo	6,20	0,56	3,46	56,34	20,46	11,83	0,56	0,59	0,00
12. Deli Serdang	5,25	1,96	4,95	37,60	2,73	44,37	1,41	0,00	1,73
13. Langkat	1,81	0,28	8,86	30,11	1,36	53,14	2,72	0,57	1,14
<b>Kota</b>									
14. Sibolga	3,28	0,55	4,92	29,51	8,74	49,18	2,19	0,00	1,64
15. Tanjung Balai	3,60	0,60	3,53	48,60	1,80	35,29	1,20	0,00	5,39
16. Pematang Siantar	3,88	0,97	11,65	36,89	14,56	27,18	0,97	0,00	3,88
17. Tebing Tinggi	1,03	0,51	1,54	47,69	3,59	41,54	0,51	1,03	2,56
18. Medan	6,10	1,02	6,78	43,05	1,69	36,95	0,68	0,68	3,05
19. Binjai	2,64	3,52	9,25	42,51	7,05	32,38	1,32	0,44	0,88
20. P. Sidempuan	4,97	0,00	11,02	47,36	6,99	22,83	4,97	0,31	1,55
<b>Sumatera Utara</b>	<b>4,90</b>	<b>1,12</b>	<b>6,40</b>	<b>42,84</b>	<b>4,48</b>	<b>36,43</b>	<b>1,45</b>	<b>0,42</b>	<b>1,98</b>
<b>Perkotaan</b>	<b>5,15</b>	<b>1,30</b>	<b>7,94</b>	<b>40,87</b>	<b>3,58</b>	<b>37,16</b>	<b>1,46</b>	<b>0,37</b>	<b>2,18</b>
<b>Pedesaan</b>	<b>4,69</b>	<b>0,96</b>	<b>5,12</b>	<b>44,46</b>	<b>5,21</b>	<b>35,83</b>	<b>1,45</b>	<b>0,46</b>	<b>1,82</b>

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara



---

---

## 1.6 KONSUMSI DAN PENGELUARAN RUMAH TANGGA

---

---

Tingkat kesejahteraan masyarakat yang dapat digambarkan oleh besarnya jumlah pendapatan yang diterimanya. Namun demikian, penggambaran tingkat kesejahteraan masyarakat melalui pendekatan pendapatan sangat sulit dilakukan karena adanya hambatan teknis di lapangan, terutama pada saat wawancara. Oleh karena itu, pendapatan rumahtangga diperkirakan dari data pengeluaran rumahtangga. Pengeluaran rumahtangga dibedakan menurut pengeluaran untuk makanan dan bukan makanan. Kedua jenis pengeluaran tersebut dapat dijelaskan dengan cukup baik bagaimana pola konsumsi umumnya masyarakat Sumatera Utara.

Di negara-negara berkembang, pengeluaran untuk keperluan makanan masih merupakan bagian terbesar dari keseluruhan pengeluaran rumahtangga. Sebaliknya di negara yang sudah maju, pengeluaran untuk aneka barang dan jasa merupakan bagian terbesar dari total pengeluaran rumahtangga. Pengeluaran yang sudah dianggap tidak primer lagi ini mencakup pengeluaran untuk perawatan kesehatan, pendidikan, rekreasi, olahraga, dan sejenisnya.

### 1.6.1. Pengeluaran Rata-rata per Kapita

Pengeluaran rata-rata per kapita sebulan penduduk Sumatera Utara semakin meningkat dari tahun ke tahun. Pengeluaran per kapita pada tahun 2004 sebesar Rp.212.585,- yang terdiri dari pengeluaran untuk makanan sebesar Rp.136.526,- dan Rp.76.059,- untuk pengeluaran bukan makanan. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar pengeluaran diperuntukan untuk konsumsi makanan, berarti sebagian besar dari penduduk masih memprioritaskan pemenuhan untuk kebutuhan primer (makanan).

**Tabel 1.6.1. Rata-rata Pengeluaran Perkapita Sebulan Untuk Makanan dan Bukan Makanan Tahun 2004**

Tahun	Makanan		Bukan Makanan		Jumlah	
	Rupiah	%	Rupiah	%	Rupiah	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1995	32.003	66,76	15.932	33,24	47.935	100,00
1996	37.498	66,03	19.291	33,97	56.789	100,00
1997	38.987	65,54	20.499	34,46	59.486	100,00
1998	50.151	68,35	23.223	31,65	73.374	100,00
1999	86.804	72,78	32.465	27,22	119.269	100,00
2000	91.874	72,15	35.465	27,85	127.339	100,00
2001	102.089	70,46	42.809	29,54	144.898	100,00
2002	122.024	68,15	57.018	31,85	179.042	100,00
2003	134.681	67,85	198.497	32,15	198.497	100,00
2004	136.526	64,22	76.059	35,78	212.585	100,00

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara

Bila dilihat dari tipe daerah, persentase pengeluaran per kapita untuk makanan di daerah pedesaan cenderung lebih besar dibandingkan dengan daerah perkotaan, yaitu 70,72 persen untuk daerah pedesaan dan 57,95 persen untuk daerah perkotaan. Keadaan ini menunjukkan bahwa penduduk di daerah pedesaan masih cenderung menggunakan pendapatan rumah tangganya untuk keperluan konsumsi makanan. Sedangkan di daerah perkotaan, porsi untuk konsumsi makanan sudah mulai dialihkan kepada keperluan lain di luar konsumsi makanan. Ini merupakan salah satu indikator bahwa kesejahteraan masyarakat di daerah perkotaan lebih baik dibanding di pedesaan (Tabel 1.6.1.).

Dengan memperhatikan kondisi daerah kabupaten/kota terlihat bahwa persentase pengeluaran untuk makanan di daerah kabupaten relatif lebih tinggi dibandingkan daerah kota. Persentase tertinggi pengeluaran untuk

makanan di Kabupaten Tapanuli Tengah (75,25 persen), disusul Kabupaten Mandailing Natal (75,23) dan Kabupaten Tapanuli Selatan (74,61 persen). Sedangkan persentase terendah pengeluaran untuk makanan terjadi di Kota Medan (53,52 persen) dan Kota Pematang Siantar (55,82 persen).

**Tabel 1.6.2. Distribusi Pengeluaran Makanan dan Bukan Makanan Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2004**

Kota/Kabupaten	Persentase	
	Makanan	Bukan Makanan
(1)	(2)	(3)
<b>Kabupaten</b>		
1. Nias	71,64	28,36
2. Mandailing Natal	75,23	24,77
3. Tapanuli Selatan	74,61	25,39
4. Tapanuli Tengah	75,25	24,75
5. Tapanuli Utara	70,32	29,68
6. Toba Samosir	70,61	29,39
7. Labuhan Batu	70,78	29,22
8. Asahan	65,24	34,76
9. Simalungun	70,36	29,64
10. Dairi	68,89	31,11
11. Karo	72,32	27,68
12. Deli Serdang	61,57	38,43
13. Langkat	67,99	32,01
<b>Kota</b>		
14. Sibolga	64,85	35,15
15. Tanjung Balai	63,09	36,91
16. Pematang Siantar	55,82	44,18
17. Tebing Tinggi	62,10	37,90
18. Medan	53,52	46,48
19. Binjai	60,54	39,46
20. P. Sidempuan	61,76	38,24
<b>Sumatera Utara</b>	<b>64,22</b>	<b>35,78</b>
<b>Perkotaan</b>	<b>57,95</b>	<b>42,05</b>
<b>Pedesaan</b>	<b>70,72</b>	<b>29,28</b>

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara



### 1.6.2. Pengeluaran Untuk Makanan

Persentase konsumsi bahan makanan tertinggi adalah pemenuhan bahan makanan padi-padian (14,07 persen), dilanjutkan dengan tembakau dan sirih (9,94 persen) dan ikan (8,87 persen).

**Tabel 1.6.3. Persentase Pengeluaran Rata-rata Perkapita Sebulan Untuk Makanan Tahun 2004**

Bahan Makanan	Perkotaan		Pedesaan		Perkotaan + Pedesaan	
	Rupiah	%	Rupiah	%	Rupiah	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Padi padian	25.579	9,99	33.069	18,29	29.903	14,07
Umbi umbian	1.767	0,69	2.273	1,26	2.059	0,97
Ikan	21.475	8,39	16.923	9,36	18.847	8,87
Daging	7.686	3,00	4.492	2,48	5.842	2,75
Telur dan Susu	10.271	4,01	6.181	3,42	7.910	3,72
Sayur sayuran	13.025	5,09	11.411	6,31	12.093	5,69
Kacang-kacangan	3.553	1,39	2.997	1,66	3.232	1,52
Buah buahan	6.415	2,51	3.630	2,01	4.807	2,26
Minyak dan Lemak	7.267	2,84	6.666	3,69	6.920	3,26
Bahan Minuman	6.600	2,58	6.589	3,64	6.594	3,10
Bumbu-bumbuan	3.215	1,26	3.221	1,78	3.218	1,51
Konsumsi lainnya	2.290	0,89	1.656	0,92	1.924	0,91
Makanan dan Minuman jadi	16.231	6,34	7.521	4,16	11.203	5,27
Minuman alkohol	622	0,24	1.001	0,55	841	0,40
Tembakau dan sirih	22.322	8,72	20.262	11,20	21.133	9,94
<b>Total Makanan</b>	<b>148.318</b>	<b>57,95</b>	<b>127.892</b>	<b>70,72</b>	<b>136.526</b>	<b>64,22</b>

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara

Tabel 1.6.3 menunjukkan bahwa bagian terbesar pengeluaran rumah tangga di daerah pedesaan dipergunakan untuk konsumsi makanan dan dibelanjakan untuk bahan makanan yang berupa padi-padian (18,29 persen). Pengeluaran ini jauh lebih tinggi daripada penduduk di daerah perkotaan 9,99 persen. Fenomena ini menunjukkan bahwa penduduk pedesaan masih

banyak memprioritaskan kebutuhan akan bahan makananan dibandingkan penduduk daerah perkotaan.

### **1.6.3. Pengeluaran Untuk Bukan Makanan**

Pengeluaran rumahtangga pada kelompok bukan makanan, sebagian besar digunakan untuk pengeluaran perumahan, bahan bakar, penerangan dan air (18,71 persen). Diikuti oleh pengeluaran untuk aneka barang dan jasa (4,34 persen). Persentase pengeluaran penduduk perkotaan untuk perumahan, bahan bakar, penerangan dan air lebih tinggi (23,38 persen) dibandingkan penduduk daerah pedesaan (13,88 persen). Demikian juga halnya dengan pengeluaran untuk aneka barang dan jasa, yaitu 5,56 persen berbanding 3,07 persen, biaya pendidikan sebesar 3,77 persen berbanding dengan 1,92 persen, biaya kesehatan sebesar 1,92 persen berbanding dengan 1,81 persen serta pengeluaran untuk pajak dan asuransi (0,98 persen berbanding 0,48 persen).

Adapun persentase pengeluaran kelompok bukan makanan, selain yang telah disebutkan di atas seperti pengeluaran untuk pakaian, alas kaki dan tutup kepala, pengeluaran untuk barang tahan lama, dan pengeluaran untuk keperluan pesta dan upacara lebih tinggi di pedesaan dibandingkan di perkotaan (Tabel 1.6.4). Pengeluaran untuk pakaian, alas kaki dan tutup kepala sebesar 4,42 persen untuk daerah pedesaan dan 3,93 persen di daerah perkotaan. Pengeluaran untuk barang tahan lama sebesar 2,51 persen untuk daerah pedesaan dan sebesar 1,62 persen untuk daerah perkotaan. Sedangkan pengeluaran untuk keperluan pesta dan upacara sebesar 1,17 persen di daerah pedesaan dan 0,90 persen di daerah perkotaan.

**Tabel 1.6.4. Persentase Pengeluaran Rata-rata Perkapita Sebulan Untuk Bukan Makanan Tahun 2004**

Bukan Makanan	Perkotaan		Pedesaan		Perkotaan + Pedesaan	
	Rupiah	%	Rupiah	%	Rupiah	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Perumahan	59.834	23,38	25.105	13,88	39.785	18,71
Aneka barang dan jasa	14.241	5,56	5.554	3,07	9.226	4,34
Biaya Pendidikan	9.646	3,77	3.479	1,92	6.086	2,86
Biaya Kesehatan	4.904	1,92	3.281	1,81	3.967	1,87
Pakaian, alas kaki dan tutup kepala	10.056	3,93	7.993	4,42	8.865	4,17
Barang tahan lama	4.140	1,62	4.546	2,51	4.375	2,06
Pajak dan Asuransi	2.507	0,98	870	0,48	1.562	0,73
Keperluan Pesta dan upacara	2.295	0,90	2.120	1,17	2.194	1,03
<b>Total Bukan Makanan</b>	<b>107.624</b>	<b>42,05</b>	<b>52.949</b>	<b>29,28</b>	<b>76.060</b>	<b>35,78</b>

Sumber : BPS Sumatera Utara



---

---

## 1.7 PERUMAHAN DAN LINGKUNGAN

---

---

Rumah merupakan kebutuhan dasar yang perlu dipenuhi selain makanan dan pakaian bagi sebagian besar penduduk. Permintaan rumah terus meningkat sejalan dengan pertumbuhan penduduk. Di pihak lain, terbatasnya lahan untuk permukiman dan penawaran perumahan hanya dapat dijangkau oleh golongan masyarakat tertentu. Hal ini merupakan kendala bagi sebagian besar masyarakat golongan menengah ke bawah dalam memenuhi kebutuhan perumahannya. Hal tersebut diatas berpengaruh pada tingginya harga rumah, sedangkan tingkat pendapatan penduduk Indonesia relatif rendah. Dengan demikian, banyak rumahtangga yang menempati rumah kurang layak, baik dipandang dari segi kesehatan maupun kepadatan penghuninya.

Masalah perumahan merupakan salah satu persoalan utama yang masih memerlukan penanganan cukup serius, baik mengenai kelengkapan sarana perumahannya maupun kelengkapan fasilitas lingkungannya. Rumah yang layak sebaiknya mampu memenuhi syarat kesehatan bagi penghuninya. Demikian pula letaknya yang mudah untuk menjangkau fasilitas lingkungan seperti sekolah, tempat berobat, pasar dan tempat rekreasi. Dengan kondisi semacam ini, keadaan perumahan beserta lingkungannya dapat menggambarkan tingkat kesejahteraan rumahtangga dan juga tingkat kesejahteraan masyarakat.

Di sisi lain, program kesehatan lingkungan yang bertujuan menjaga, membentuk/mencapai dan melestarikan keadaan lingkungan yang sehat, bersih dan nyaman juga dilakukan. Hal ini disadari bahwa perumahan saat ini tidak hanya sekedar tempat berteduh tetapi merupakan cermin kehidupan masyarakat. sehingga perlu terwujudnya rumah sehat yang dapat memberikan rasa nyaman dan nikmat bagi penghuninya.

### 1.7.1. Luas Lantai

Luas lantai dapat digunakan sebagai salah satu indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat karena merupakan salah satu aspek yang dapat menggambarkan keadaan suatu tempat tinggal. Luas lantai terkait dengan tingkat penghasilan rumahtangga, karena harga tanah yang semakin mahal saat ini. Semakin luas lantai suatu rumahtangga, maka semakin tinggi pula tingkat ekonomi rumahtangga.

Luas lantai yang dimiliki rumah tangga dapat dilihat dari Tabel 1.7.1. Sebagian besar rumahtangga menempati rumah dengan luas lantai 20-49 m<sup>2</sup> (41,35 persen). Rumah dengan luas lantai yang sempit tidak memberikan kenyamanan bagi penghuninya dan akan mengakibatkan orang tidak betah di rumah. Di Sumatera Utara masih ada sekitar 1,84 persen rumahtangga yang memiliki luas lantai kurang dari 20 m<sup>2</sup>. Di pedesaan persentasenya justru lebih besar yaitu sekitar 2,17 persen dibandingkan diperkotaan sebesar 1,37 persen.

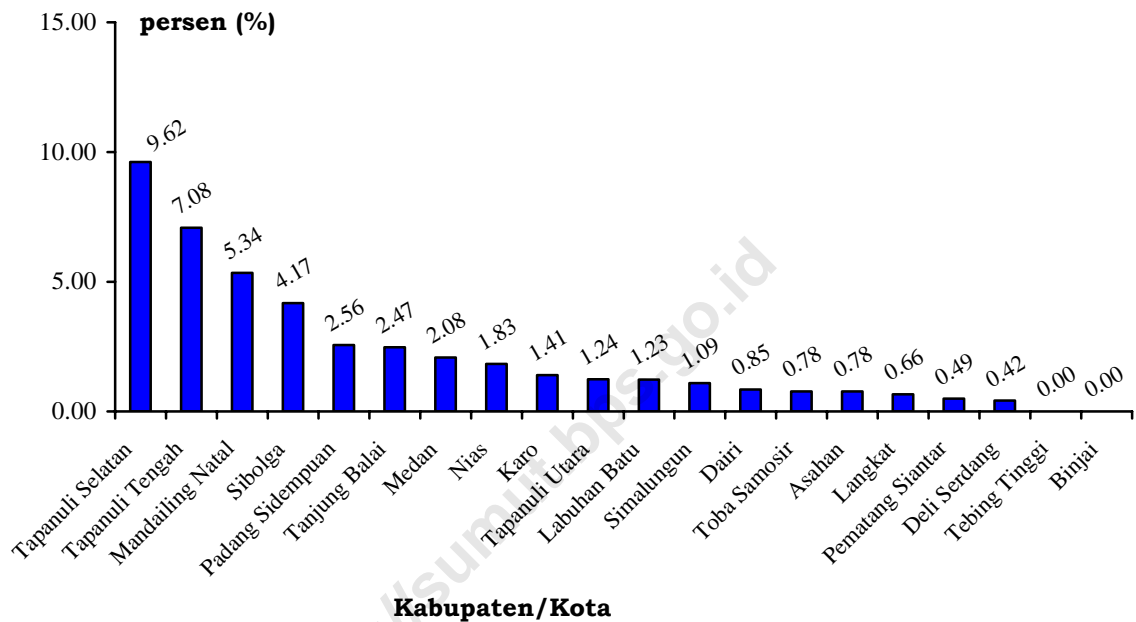
**Tabel 1.7.1. Persentase Rumahtangga Menurut Luas Lantai, 2004**

Luas Lantai (M <sup>2</sup> )	Perkotaan	Pedesaan	Perkotaan + Pedesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
< 20	1,37	2,17	1,84
20 – 49	32,66	47,72	41,35
50 – 59	10,05	12,50	11,46
60 – 99	38,93	31,99	34,92
100 – 149	10,99	4,03	6,97
150 +	6,00	1,59	3,45

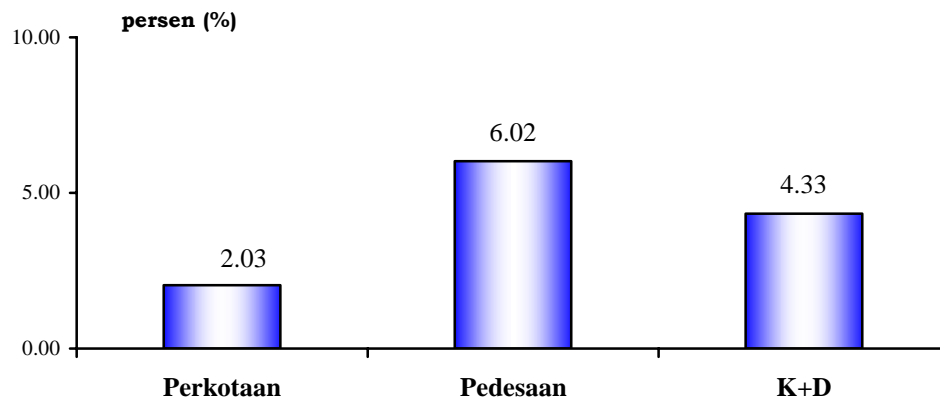
Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara

Gambaran rumahtangga yang mempunyai luas lantai di bawah 20 m<sup>2</sup> menurut daerah kabupaten/ kota pada tahun 2004 dapat dilihat dalam Gambar 1.7.1.

**Gambar 1.7.1.: Pesentase Rumahtangga Yang Mempunyai Luas Lantai Kurang dari 20 m<sup>2</sup> Menurut Kabupaten/Kota, 2004**



**Gambar 1.7.2.: Pesentase Rumahtangga Yang Mempunyai Lantai Terlalu Terbuat dari Tanah, 2004**

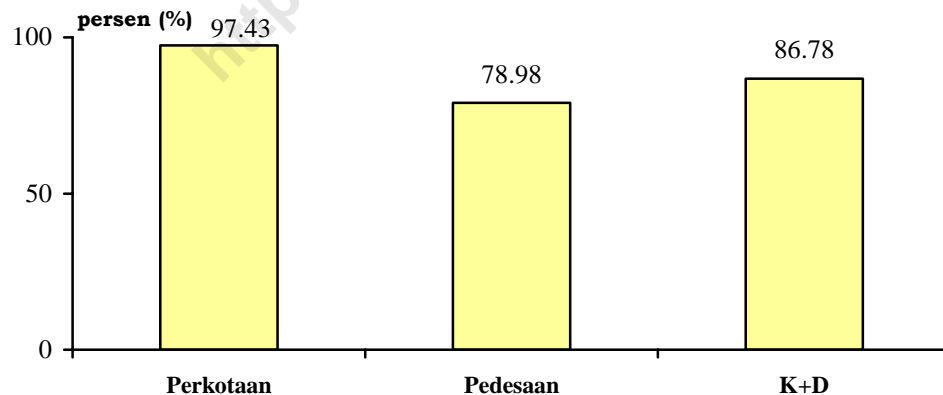


Dari lantai rumah ini dapat dilihat keadaan lantai terluas. Jika lantai terluas terbuat dari tanah jelas kurang sehat, karena sulit dibersihkan jika terkena kotoran atau kuman-kuman penyakit. Sekitar 4,33 persen rumahtangga di Propinsi Sumatera Utara masih tinggal di rumah dengan lantai tanah. Kondisi yang memprihatinkan ini masih menjadi pemandangan di daerah pedesaan, sebab masih 6,02 persen rumahtangga sehari-hari tinggal di rumah yang lantainya kurang sehat (Gambar 1.7.2.).

### 1.7.2. Sumber Penerangan

Fasilitas perumahan yang digunakan oleh rumahtangga dapat mencerminkan tingkat kesehatan rumah beserta lingkungannya. Pada tahun 2004 sekitar 86,78 persen rumahtangga sudah menggunakan listrik PLN untuk sumber penerangan (Gambar 1.7.3). Kondisi penggunaan sumber penerangan berasal dari listrik PLN di daerah perkotaan lebih tinggi (97,43 persen) dibandingkan di daerah pedesaan (78,98 persen).

**Gambar 1.7.3.: Pesentase Rumahtangga Yang Menggunakan Sumber Penerangan dari Listrik PLN, 2004**



### 1.7.3. Sumber Air Minum

Kualitas air yang digunakan terkait erat dengan tingkat kesehatan. Oleh sebab itu pada saat mencari tempat tinggal, biasanya yang menjadi perhatian utama adalah tentang keadaan airnya. Dibanding dengan sumber

air lainnya, air leding merupakan sumber air yang paling baik kualitasnya. Air yang berasal dari pompa, sumur, sungai, hujan dan sebagainya, dianggap kurang baik karena kemungkinan tercemarnya relatif cukup besar.

**Tabel 1.7.2. Persentase Rumahtangga Menurut Sumber Air Minum, 2004**

Sumber Air Minum	Perkotaan	Pedesaan	Perkotaan + Pedesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
Ledeng/Air dlm kemasan	47.24	5.97	23.41
Pompa	9.89	11.73	10.95
Sumur terlindungi	35.23	33.73	34.36
Sumur tdk terlindungi	5.24	17.45	12.29
Mata Air	1.13	11.62	7.19
Mata Air terlindungi	0.29	10.46	6.16
Air Sungai/hujan	0.27	8.26	4.89
Lainnya	0.70	0.77	0.74

Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sumatera Utara Tahun 2004

Sebagian besar rumah tangga menggunakan sumber air minum dari sumur terlindungi (34,36 persen) dan ledeng/air dalam kemasan (23,41 persen). Pada daerah pedesaan penggunaan sumber air dari ledeng/air kemasan lebih sedikit (5,97 persen) dibandingkan daerah perkotaan (47,24 persen). Sebaliknya, sumber air minum dari mata air, untuk daerah pedesaan lebih tinggi dibandingkan daerah perkotaan. Hal ini wajar karena pada sebagian daerah pedesaan banyak sumber mata air, dan tidak/belum tersedianya fasilitas air leding. Hal tersebut disebabkan pemerintah belum dapat memenuhi kebutuhan seluruh rumahtangga, disamping itu juga karena faktor ekonomi masyarakat pedesaan yang belum baik.



#### 1.7.4. Tempat Buang Air Besar

Fasilitas dalam rumahtangga selain sumber air minum dan listrik adalah tempat buang air besar. Tempat buang air besar yang memenuhi syarat kesehatan adalah yang menggunakan tangki septik sehingga limbah manusia tersebut tidak mencemari lingkungan, terutama sumber air minum (pada sumur pompa atau sumur).

**Tabel 1.7.3. Persentase Rumahtangga menurut Tempat Penampungan Akhir Kotoran dan Daerah Tempat Tinggal, 2004**

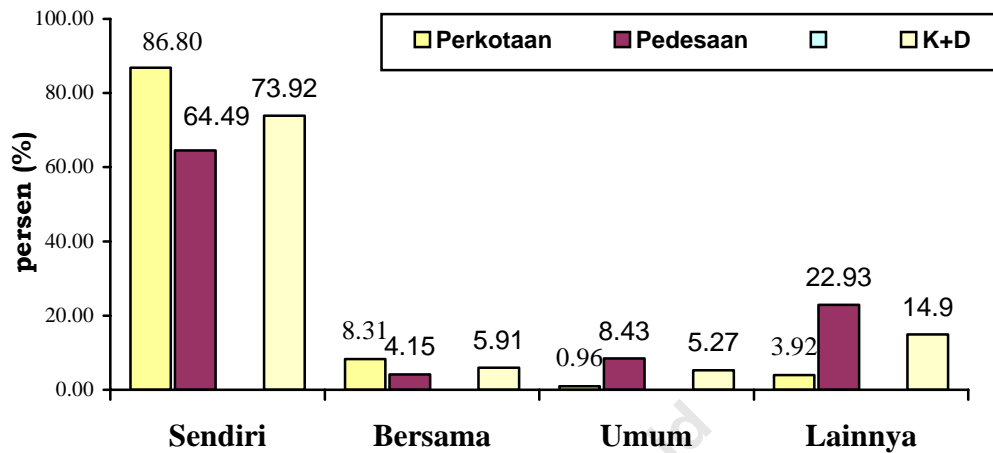
Tempat penampungan kotoran/tinja	Perkotaan	Pedesaan	Perkotaan+ Pedesaan
[1]	[2]	[3]	[4]
1. Tangki	73,44	24,55	45,21
2. Kolam/sawah	0,65	1,47	1,12
3. Sungai/Danau/Laut	6,32	19,39	13,86
4. Lainnya	19,60	54,60	39,80
J u m l a h	100,00	100,00	100,00

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Propinsi Sumatera Utara Tahun 2004

Oleh karena itu tempat penampungan akhir sangat penting bagi kesehatan lingkungan. Tangki merupakan pilihan terbanyak yang dimiliki oleh rumahtangga di daerah perkotaan sebesar 73,44 persen, sedangkan di pedesaan hanya 24,55 persen. Selain penampungan di tempat lain (54,60 persen) di pedesaan juga banyak rumahtangga yang membuang air besar di sungai/danau/laut sebanyak 19,39 persen.

Jika dilihat dari status kepemilikan fasilitas tempat buang air besar, secara keseluruhan sebagian besar rumahtangga sudah mempunyai fasilitas sendiri (73,92 persen). Di daerah perkotaan 86,80 persen lebih besar dibandingkan daerah pedesaan 64,49 persen.

**Gambar 1.7.4.: Pesentase Rumahtangga Menurut Kepemilikan Fasilitas Tempat Buang Air Besar, 2004**



#### 1.7.5. Penggunaan Jenis Dinding dan Atap Rumah

Seperti halnya kepemilikan barang rumahtangga lainnya, penggunaan jenis dinding rumah dan atap rumah dapat menggambarkan tingkat kesejahteraan pemiliknya. Di Sumatera Utara, kayu/papan paling banyak digunakan sebagai dinding rumah sebesar 50,57 persen, kemudian tembok 44,09 persen. Di daerah perkotaan lebih banyak yang menggunakan tembok sebagai dinding (64,77 persen) dibandingkan kayu/papan (32,37 persen). Sebaliknya, di daerah pedesaan jauh lebih banyak rumahtangga yang menggunakan kayu/papan sebagai dinding rumahnya (63,89 persen) dibandingkan tembok yang hanya 28,95 persen. Hal ini disebabkan di pedesaan lebih mudah dan murah mendapatkan kayu/papan dibandingkan batu bata/tembok, sedangkan di perkotaan lebih mudah mendapatkan batu bata/tembok. Disamping itu, tingkat ekonomi penduduk perkotaan lebih baik dibandingkan di pedesaan.

**Tabel 1.7.4. Persentase Rumahtangga Menurut Daerah Tempat Tinggal Dan Jenis Dinding Terbanyak, 2004**

Daerah Tempat Tinggal	Jenis Dinding Terbanyak			
	Tembok	Kayu	Bambu	Lainnya
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
- Perkotaan	64,77	32,37	2,18	0,68
- Pedesaan	28,95	63,89	6,18	0,98
- K + D	44,09	50,57	4,49	0,85

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Sumatera Utara Tahun 2004.

Selanjutnya penggunaan seng untuk atap secara umum paling banyak digunakan rumahtangga di Propinsi Sumatera Utara, yaitu sekitar 84,07 persen rumahtangga (Tabel 1.7.5). Atap ijuk/daun masih cukup besar, yaitu 12,31 persen di pedesaan dan 2,61 persen di perkotaan. Secara ekonomi, seng atau asbes memang lebih murah dibandingkan genteng, namun pemilihan seng/asbes sebagai atap di Sumatera Utara memang tidak hanya dipengaruhi oleh tingkat pendapatan, tetapi lebih banyak dipengaruhi oleh kebiasaan masyarakat setempat.

**Tabel 1.7.5. Persentase Rumahtangga Menurut Daerah Tempat Tinggal Dan Jenis Atap Terluas, 2004**

Daerah Tempat Tinggal	Jenis Atap Terluas						
	Beton	Sirap	Gen- teng	Seng	Asbes	Ijuk/ Daun	Lain- nya
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
- Perkotaan	3,76	0,81	5,20	84,65	2,46	2,61	0,51
- Pedesaan	1,34	0,96	0,58	83,65	1,04	12,31	0,12
- K + D	2,36	0,90	2,54	84,07	1,64	8,21	0,24

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Sumatera Utara Tahun 2004

<http://sumut.bps.go.id>

**BPS**

***Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara***

*Jl. Asrama Nomor 179 Medan 20123*

*Telepon (061) 8452343, 8459966; Faksimili (061) 8452773*

*E-mail bps [1200@medan.wasantara.net.id](mailto:1200@medan.wasantara.net.id); Homepage [www.Bps.go.id](http://www.Bps.go.id)*